



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

SURAKARTA
2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rakhmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023. LKjIP Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu (1) tahun anggaran. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Surakarta, Januari 2024

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KOTA SURAKARTA' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' around the bottom edge. In the center, there is a signature and the name 'BUDI MURTONO, SE, M.Si'.
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA
BUDI MURTONO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197110101998031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	7
B. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA.....	13
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA.....	14
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	16
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023	26
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	65
C. PENCAPAIAN LAINNYA	73
BAB IV.....	75
PENUTUP.....	75
A. KESIMPULAN.....	75
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta.....	12
Gambar 3.1 Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota.....	31
Gambar 3.2 Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota.....	33
Gambar 3.3 Pendampingan kepada OPD terkait PM Evaluasi Kelembagaan dan Kematangan Organisasi.....	35
Gambar 3.4 Workshop Penyusunan Laporan dan PM Evaluasi Kelembagaan dan Kematangan Organisasi dari Biro Organisasi SETDA Jateng.....	36
Gambar 3.5 Aplikasi Sanja Simbak untuk Maturitas Kelembagaan	36
Gambar 3.6 Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi ...	37
Gambar 3.7 Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	39
Gambar 3.8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Kota Surakarta	41
Gambar 3.9 Level MRI	43
Gambar 3.10 Capaian Indikator Level MRI dengan Akhir RPJMD.....	45
Gambar 3.11 Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.....	47
Gambar 3.12 Pendampingan Terhadap OPD Terkait Pengelolaan Risiko.....	47
Gambar 3.13 Kolaborasi Sakip (Bag. Organisasi) dan MR	47
Gambar 3.14 Koordinasi Intensif dengan BPKP	48
Gambar 3.15 Integrasi Aplikasi SARKEMIS dengan Sistem SPIP Inspektorat	48
Gambar 3.16 Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya.....	50
Gambar 3.17 Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya dengan Akhir RPJMD.....	52
Gambar 3.18 Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah	53
Gambar 3.19 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Nilai LPPD per Triwulan.....	54
Gambar 3.20 Perbandingan Capaian Nilai LPPD dengan Akhir RPJMD	56
Gambar 3.21 Asistensi Penyusunan LPPD.....	58
Gambar 3.22 Progres Capaian per Triwulan untuk Indikator Nilai SAKIP	59
Gambar 3.23 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Akhir RPJMD.....	62
Gambar 3.24 Aplikasi ESAKIP yang terintegrasi dengan SIPPD	64
Gambar 3.25 Workshop Aplikasi E-SAKIP Kota Surakarta Tahun 2023.....	64
Gambar 3.26 Piagam Penghargaan Kota Peduli HAM Tahun 2022	73
Gambar 3.27 Penghargaan Sekda Terbaik.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pegawai Sekretariat Daerah.....	8
Tabel 1.2 Aset Sekretariat Daerah	9
Tabel 1.3 Kesenambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026.....	14
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	17
Tabel 2.2 Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah	18
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	26
Tabel 2.5 Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023	26
Tabel 3.1 Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023	28
Tabel 3.2 Proges Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif.....	30
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Tahun 2021-2023	31
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota dengan Akhir RPJMD.....	32
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Kegiatan Penataan Organisasi.....	33
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi Tahun 2021-2023	37
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dengan Akhir RPJMD.....	38
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	39
Tabel 3.9 Proges Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis Mengelola Risiko dan Potensi Sumberdaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan Pemerintah Daerah	42
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Level MRI tahun 2021-2023	43
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Level MRI dengan Akhir RPJMD	44
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kegiatan Administrasi Pembangunan	45
Tabel 3.13 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	49
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya	50
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya 2023 dengan Akhir RPJMD.....	51
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Nilai LPPD tahun 2021-2023	54

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Nilai LPPD dengan Akhir RPJMD	55
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	57
Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP tahun 2021-2023	60
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Akhir RPJMD	61
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Kegiatan Penataan Organisasi	62
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023	66
Tabel 4.1 Capain Indikator Kinerja Tahun 2023	75
Tabel 4.2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat untuk Masing-Masing Indikator.....	76
Tabel 4.3 Total Efisiensi Anggaran Tahun 2023 untuk Masing-Masing Indikator ...	81
Tabel 4.4 Rencana Awal Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Daerah Kota Surakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota Terkait Tugas dan Fungsinya.

1. Susunan Kepegawaian

Keberhasilan suatu perangkat daerah tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah sumber daya manusia atau Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa pengelolaan ASN didasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 292 pegawai yang tersebar di 9 (sembilan) bagian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Pegawai Sekretariat Daerah

KATEGORI		ASN		Non-ASN	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
UMUR	20 Kebawah	0	0	1	0
	21 - 30 thn	17	16	35	24
	31 - 40 thn	18	23	37	3
	41 - 50 thn	26	21	31	2
	51 - 60 thn	21	8	8	1
Jumlah		82	68	112	30
Pendidikan	SD	2	0	1	0
	SMP	2	0	0	0
	SMA	13	9	89	10
	D1	0	0	1	0
	D3	13	8	4	4
	S1	38	42	17	15
	S2	14	9	0	1
	S3	0	0	0	0
Jumlah		82	68	112	30
Golongan	IV	11	6	0	0
	III	47	52	0	0
	II	20	10	0	0
	I	4	0	0	0
	Non Golongan (TKPK)	0	0	112	30
Jumlah		82	68	112	30
Kelompok Jabatan	Struktural	8	10	0	0
	Fungsional	22	14	0	0
	Pelaksana	52	44	0	0
	Non-Jabatan (TKPK)	0	0	112	30
Jumlah		82	68	112	30

2. Aset Yang Dimiliki

Tabel 1. 2 Aset Sekretariat Daerah

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Tanah	3
2.	Peralatan dan Mesin	
	a. Alat Besar	10
	b. Alat Angkutan	46
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3
	d. Alat Pertanian	5
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	981
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	25
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	4
	h. Alat Laboratorium	3
	i. Komputer	109
	j. Alat Keselamatan Kerja	5
3.	Gedung dan Bangunan	37
4.	Aset Tetap Lainnya	97
5.	Barang bercorak kesenian/Kebudayaan	96

Sumber : simda barang

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah:

- 1.) Sekretaris Daerah;
- 2.) Asisten;
- 3.) Bagian;
- 4.) Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten, terdiri dari 3 Asisten dan yang membawahi Bagian antara lain meliputi:

- 1.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, selaku koordinator atas:

- a.) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - a.1.) Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan;
 - a.2.) Sub Koordinator Otonomi Daerah; dan
 - a.3.) Sub Koordinator Kerja Sama;
 - b.) Bagian Hukum, terdiri atas:
 - b.1.) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b.2.) Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
 - b.3.) Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c.) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - c.1.) Sub Koordinator Bina Mental Spiritual; dan
 - c.2.) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
- 2.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, selaku koordinator atas:
- a.) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 - a.1.) Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - a.2.) Sub Koordinator Pengendalian Perekonomian, UMKM dan Ekonomi Kreatif; dan
 - a.3.) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Alam.
 - b.) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - b.1.) Sub Koordinator Penyusunan dan Pengendalian Program Pembangunan; dan
 - b.2.) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c.) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - c.1.) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c.2.) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - c.3.) Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

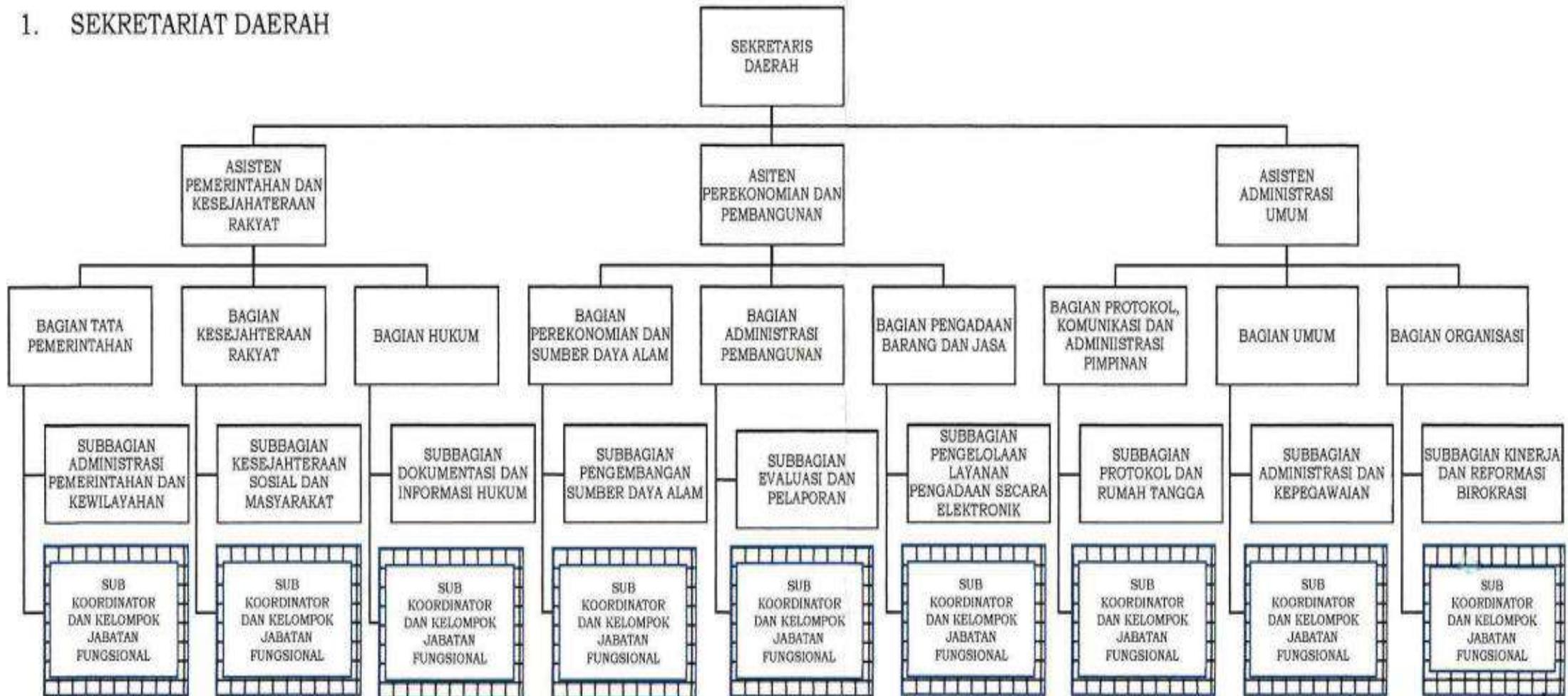
3.) Asisten Administrasi Umum.

Asisten Administrasi Umum, selaku koordinator atas:

- a.) Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a.1.) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - a.2.) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - a.3.) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

- b.) Bagian Umum terdiri atas:
 - b.1.) Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
 - b.2.) Subbagian Administrasi dan Kepegawaian; dan
 - b.3.) Sub Koordinator Perlengkapan;
- c.) Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan terdiri atas:
 - c.1.) Sub Koordinator Tata Usaha Pimpinan;
 - c.2.) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan
 - c.3.) Subbagian Protokol dan Rumah Tangga;

1. SEKRETARIAT DAERAH



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta

B. FUNGSI STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Sekretariat Daerah Kota Surakarta merumuskan visi sebagai berikut terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif pemerintahan daerah yang baik guna mendukung Visi Kota Surakarta sebagai kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera.

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah Kota Surakarta merumuskan 3 (tiga) misi untuk menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam rangka mencapai visi tersebut yaitu :

1. Mewujudkan penyusunan kebijakan dan koordinasi tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan responsif;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan kebijakan, koordinasi administratif dan pelayanan administratif untuk pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh, infrastruktur berkelanjutan, serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta.

Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kinerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Rencana Kerja yang disusun oleh setiap organisasi harus sinergi dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD. Dengan perencanaan yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Perangkat Daerah dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Tabel 1. 3 Kesiambungan RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026

VISI WALI KOTA SURAKARTA
MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA
MISI WALI KOTA SURAKARTA
<p>Misi 1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan</p> <p>Misi 2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan</p> <p>Misi 3 Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan</p> <p>Misi 4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</p> <p>Misi 5 Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan</p> <p>Misi 6 Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif</p> <p>Misi 7 Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati</p>
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SETDA
TUJUAN: Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif
<p>SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surakarta berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, maka masih ditemukannya permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya proses penyusunan perencanaan fisik dan keuangan OPD dan pelaporan OPD mengenai progress capaian realisasi kegiatan sering mengalami keterlambatan;
2. Kurang sinkronnya antara program pelaksanaan TJSP dengan program

skala prioritas pembangunan dan belum optimalnya koordinasi program TPID.

3. Kurangnya SDM Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi standar kompetensi;
4. Belum optimalnya capaian nilai LPPD dikarenakan belum seluruh IKK dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan;
5. Belum optimalnya kerjasama kelembagaan sosial dan keagamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan,
6. Belum optimalnya pembinaan mental spiritual dan keagamaan;
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki kapabilitas dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait pembentukan produk hukum daerah;
8. Keterbatasan sumber daya dan kebutuhan inovasi daerah sehingga menuntut adanya peningkatan kerja sama daerah yang efektif khususnya pada kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
9. Belum adanya perencanaan pengembangan wilayah regional yang mampu mensinkronkan dan mengakomodir kebutuhan serta potensi kabupaten/kota sebagai dasar/pedoman peningkatan kerjasama antar daerah se-SUBOSUKAWONOSRATEN;
10. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan belum optimalnya pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Surakarta
11. Belum optimalnya sumber daya dalam menganalisis media dan informasi guna objektivitas sajian informasi yang berimbang dan bertanggung jawab dalam rangka membangun citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
12. Belum tepatnya waktu pelaksanaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di rumah jabatan KDH dan WKDH, yang mengakibatkan beberapa komponen sarpras mengalami kerusakan sebelum dilakukannya aksi pemeliharaan dikarenakan faktor usia sarpras dan kondisi cuaca.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Perwali Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 adalah mendukung misi 5, Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Gesit Dan Kolaboratif Berdasarkan Semangat Gotong Royong Dan Kebhinekaan dengan rincian sebagai berikut:

Nama perangkat : Sekretariat Daerah daerah

Urusan pemerintahan : Fungsi Penyusunan kebijakan, koordinasi yang dilaksanakan administratif dan pelayanan administratif

Tugas : membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Fungsi : a) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan	<p>Maturitas keelembagaan adalah ukuran kualitas, serta kematangan atau kedewasaan dari system kelembagaan yang mencakup 11 variabel penilaian. Indikator Nilai maturitas Kelembagaan dipilih karena merepresentasikan reformasi kapasitas tata kelola birokrasi yang responsif, cerdas, akuntabel, dan inovatif sebagai mesin penggerak pencapaian visi dan misi daerah.</p> <p>Formula Pengukuran:</p> $KOD = \frac{TNPD}{JPD} \times 100\%$ <p>KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah</p>
	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	<p>Indikator ini dipilih sebagai tolak ukur pencapaian misi birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif. Sehingga semakin meningkat kerjasama yang terimplementasi akan semakin mendukung pencapaian misi tersebut</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>Persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun n berjalan – persentase kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun (n-1)</p>

2. Indikator dan Target Kinerja Sasaran Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan/atau Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Tabel 2. 2 Indikator dan Target Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif		Maturitas Kelembagaan	$KOD = \frac{TNPd}{JPD} \times 100\%$ <p>KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPd = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah</p>	Nilai	37,14	36,10	37,10	38,00	40,00	44,00	46,00
			Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	Persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan oleh perangkat daerah tahun berjalan dikurangi persentase kerjasama daerah yang diimplementasikan oleh perangkat daerah tahun sebelumnya	%	N/A	N/A	5	8	8	10	10
		Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI		Level	N/A	N/A	2,5	2,75	3	3	3
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun	Jumlah naskah kerjasama daerah yang diimplementasi oleh perangkat daerah dibagi Jumlah naskah kerjasama daerah yang ditandatangani x 100%	%	N/A	N/A	95	96	97	98	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			berikutnya									
			Nilai LPPD	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun N-2	Nilai	N/A	3,35	3,4	3,5	3,6	3,8	4
			Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Kota Surakarta Tahun N-2	Nilai	69	70	75	80	85	90	95

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	38,00
	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	8
Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	Level	2,75
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Level MRI	level	2.75
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase meningkatnya laba perusahaan BUMD	%	92
	Fasilitasi Penyelenggaraan Rakor TPID dan Monev 4K (Keterjangkauan, Ketersediaan, Kelancaran Distribusi dan Kelancaran Informasi)	%	100
	Presentase Peningkatan Perusahaan yang melaksanakan CSR/TJSP	%	60
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dok	38
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dok	1
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	55
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dok	23
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian nilai PM MRI level kota	Nilai	2,25
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dok	2
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	34
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya lelang/ tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Pokja BPBJ	%	100

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dok	4
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dok	3
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	org	1326
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Ketersediaan Stock LPG	%	100
	Persentase Terlaksananya Penyampaian Informasi terkait LPG	%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dok	1
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dok	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,5
	Nilai SAKIP	Nilai	80
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Nilai	3,5
	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96
Administrasi Tata Pemerintahan	Rata-rata capaian kinerja SPM	%	79
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dok	0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dok	15
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dok	16
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase ormas dan lembaga keagamaan yang aktif dalam kerjasama bidang kesra	%	80
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dok	27

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dok	2
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dok	2
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase fasilitasi bidang hukum dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah	%	98
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dok	600
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	kasus	11
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dok	5100
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	%	100
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dok	46
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dok	16
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	26.9
	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	53
Penataan Organisasi	Nilai SKM Pemerintah Kota Surakarta	nilai	85
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dok	0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	6
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dok	5

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dok	8
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dok	3
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang	2
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	2
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	pesentase pemenuhan fasilitasi pimpinan di bidang keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi pimpinan	%	100
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	720
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	720
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	720
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase pemenuhan sarpras pimpinan daerah	%	100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	12
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	nilai	77
	Nilai SPIP OPD	nilai	2,75
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	7
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	168
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	%	100
	Nilai SKM OPD	nilai	84,75
	Nilai Maturitas Kelembagaan	skor	45
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	1
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	114
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	26
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	75
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya sarana prasarana untuk administrasi umum kantor	%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	11
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	41
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	6
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			sebelum	setelah
1.	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	38	38
		Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi	8	8
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	2,75	2,75
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	96	96
		Nilai LPPD	3,5	3,5
		Nilai SAKIP	80	80

Tabel 2. 5 Anggaran Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)		KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH	
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.805.317.155	1.403.467.000	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	27.474.078.868	11.166.392.755	APBD
3.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.741.949.957	48.929.328.763	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pada tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Predikat	Nilai	Mean
Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak Berhasil	$n < 55$	27,5

n = capaian

Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

- a) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realiasi 2023			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	38	50,63	133,24
		Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi	%	8	34,02	425,25
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah	Level MRI	Level	2,75	3,106	112,95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realiasi 2023			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah					
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96	88,06	91,73
		Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,57	102,00
		Nilai SAKIP	Nilai	80	78,46	98,07
Rata-Rata Capaian						158,91

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari 6 indikator ada sasaran terdapat tiga indikator yang tidak tercapai atau mengalami perlambatan, yaitu indikator Nilai SAKIP dan Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya. Capaian keseluruhan indikator jika dirata-rata pada tahun 2023 dikatakan sangat berhasil dengan perolehan angka capaian 158,91. Jika dilihat dari skala ordinal, capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dikatakan Sangat Berhasil.

Masing-masing indikator sasaran strategis memiliki target yang harus dicapai setahun triwulan tahun berjalan. Target yang ditetapkan di tiap triwulan dilakukan dengan dua konsep yaitu kumulatif dan non kumulatif. Pada indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dilakukan dengan konsep kumulatif dimana target yang ditetapkan pada tiap-tiap triwulan jika dijumlahkan menjadi target tahunan.

1. Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif

Pada sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif memiliki dua indikator yaitu Maturitas Kelembagaan dan Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dengan progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Proges Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif

NO	Indikator	Satuan	TARGET					TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian	Predikat									
1	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	38	38	38	38	38	45	118,42	Sangat berhasil	45	118,42	Sangat berhasil	45	118,42	Sangat berhasil	50,63	113,24	Sangat berhasil
2	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	8	3,09	2,06	2,06	1,03	7,22	233,66	Sangat berhasil	2,06	100	Sangat berhasil	4,12	200	Sangat berhasil	20,6	2000	Sangat berhasil
Rata-rata									176,04			109,21			159,21			1066,62	

a. Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta

Target Nilai Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 adalah 38. Nilai Maturitas Kelembagaan adalah hasil penilaian yang dilakukan setahun sekali, sehingga target tiap triwulan dipasang sesuai dengan target tahunan dimana realisasi triwulan I - III masih menggunakan nilai tahun 2022 yaitu 45. Nilai Maturitas Kelembagaan tahun 2023 keluar pada triwulan IV dengan nilai 50,63 berdasarkan hasil pemeriksaan dan validasi oleh Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 2023. Progres capaian nilai maturitas kelembagaan per triwulan sebagaimana terlihat dalam chart di bawah ini:



Gambar 3. 1 Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota

Nilai Maturitas kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta jika dibandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Tahun 2021-2023

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	36,1	41,8	37,1	45	38	50,63

Dari tahun 2021 hingga 2023 target nilai maturitas kelembagaan pemerintah kota dapat diraih bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi nilai maturitas kelembagaan pemerintah kota pada tahun 2023 meningkat 5,63 dari tahun 2022. Peningkatan realisasi juga terjadi pada tahun tahun sebelumnya.

Berikut perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Indikator Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	36,1	41,8	115,79	37,1	45	121,29	38	50,63	133,24	46	110,07

Nilai Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 sebesar 50,63 meningkat daripada tahun 2022 sebesar 5,63 yang mana Nilai Maturitas Kelembagaan Tahun 2022 sebesar 45. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capainya sudah 110,07% dengan nilai target RPJMD sebesar 46. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemenuhan data dukung 11 variabel yang lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya serta penataan organisasi dan tata laksana yang baik. Upaya lain berupa sosialisasi dan desk maturitas kelembagaan yang intens terkait data dukung 11 variabel penilaian KOD yang diperlukan juga memberikan dampak yang signifikan akan kenaikan nilai maturitas kelembagaan. Namun begitu, masih terdapat beberapa komponen data dukung 11 variabel penilaian KOD dari Perangkat Daerah yang belum tersusun secara maksimal sehingga menyebabkan pencapaian Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota belum tercapai penilaian kategori sangat tinggi. Oleh sebab itu, masih diperlukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang nilai masing-masing 11 variabelnya masih rendah dan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di 11 variabel tersebut dengan dilengkapi data dukung.



Gambar 3. 2 Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota

Untuk mencapai target nilai maturitas kelembagaan pemerintah kota, Sekretariat Daerah Kota Surakarta mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran maupun metode yang digunakan. Mencapaian realisasi nilai maturitas kelembagaan tidak terlepas dari Kerjasama tim di Sekretariat Daerah dan seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, seluruh kegiatan dalam mencapai target tersebut juga didukung adanya anggaran yang telah ditetapkan. Berikut realisasi anggaran yang digunakan pada kegiatan penataan organisasi:

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Kegiatan Penataan Organisasi

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi(Rp)
			sebelum	setelah	selisih	
1	Penataan Organisasi		2.306.102.700	1.853.846.954	(452.255.746)	1.821.957.112
2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		774.804.000	701.914.000	(72.890.000)	691.415.103
		Evaluasi Kelembagaan	204.477.000	112.677.000	(91.800.000)	109.538.003
		Penyusunan Dokumen Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	168.768.900	194.128.900	25.360.000	191.923.400
		Penyusunan Dokumen SKJ di Pemerintah Kota	333.666.100	333.216.100	(450.000)	329.489.650
		Penyusunan Perkada Tambahan Penghasilan ASN	67.892.000	61.892.000	(6.000.000)	60.464.050
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		409.028.700	161.620.200	(247.408.500)	157.401.900
		Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	180.424.980	121.395.200	(59.029.780)	118.428.900
		Penyusunan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Pelayanan Publik		0	0	0
		Sekretariat Supervisi Penanganan COVID-19	78.603.720	12.505.000	(66.098.720)	12.253.000
		Penyusunan Perkada Jam Kerja Pemerintah Kota Surakarta	150.000.000	27.720.000	(122.280.000)	26.720.000
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		341.012.000	283.105.354	(57.906.646)	277.567.004
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi	241.012.000	194.765.354	(46.246.646)	191.028.104
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	100.000.000	88.340.000	(11.660.000)	86.538.900
5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		537.039.000	466.963.400	(70.075.600)	459.201.015
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	118.730.000	118.730.000	0	115.853.000
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKM di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	194.405.000	129.414.400	(64.990.600)	126.969.650
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	99.294.000	101.174.000	1.880.000	98.720.490
		Pemeliharaan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	124.610.000	117.645.000	(6.965.000)	42.452.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		244.219.000	240.244.000	(3.975.000)	236.372.090
		Penyusunan LKIP dan PK Pemerintah Kota Surakarta	244.219.000	240.244.000	(3.975.000)	236.372.090

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi pengurangan anggaran pada kegiatan penataan organisasi sebesar Rp 452.255.746,00 dari pagu yang semula Rp 2.306.102.700,00 menjadi Rp 853.846.954,00. Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Organisasi berusaha memaksimalkan efisiensi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan. Dari anggaran tersebut, Bagian Organisasi merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.821.957.112,00. Anggaran tersebut digunakan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Tercapainya target dan meningkatnya nilai maturitas kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta karena dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Melakukan pendampingan secara intensif kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan membagi Tim Verifikator bagi OPD untuk melaksanakan penilaian mandiri terhadap evaluasi kelembagaan dan kematangan organisasi perangkat daerah, sehingga pengisian analisa terhadap evaluasi kelembagaan tepat dan sesuai dengan keadaan masing-masing OPD, serta pendampingan untuk pengisian data dukung terhadap 11 variabel dalam penilaian kematangan organisasi perangkat daerah bisa terlengkapi sesuai dengan tingkat penilaian sehingga kendala dalam proses penginputan nilai maupun pengumpulan bukti dukung dalam aplikasi bisa diselesaikan dan pelaporan terkait penilaian maturitas kelembagaan tingkat kota bisa tepat waktu.
- Dilakukannya workshop terkait dengan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No. 99 Th. 2018 dan Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Daerah berdasarkan PermenpanRB No. 20 Th. 2018, serta penyusunan laporan evaluasi kelembagaan secara luring dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap kematangan organisasinya.
- Meningkatnya kesadaran akan pentingnya kematangan organisasi dan kelembagaan OPD dalam pemahaman pimpinan yang ditunjukkan dengan pembuktian yang relevan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan maturitas kelembagaan (sosialisasi, review maturitas kelembagaan, dll)

- Berkoordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam hal pembinaan penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- Mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi Sanja Simbak dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan maupun kesalahan sistem dalam aplikasi Sanja Simbak.



Gambar 3. 3 Pendampingan kepada OPD terkait PM Evaluasi Kelembagaan dan Kematangan Organisasi



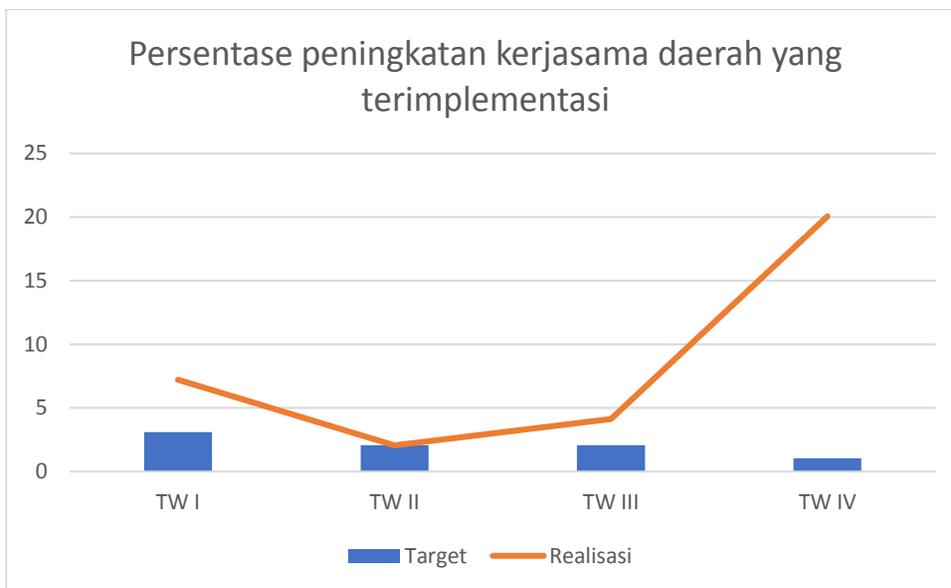
Gambar 3. 4 Workshop Penyusunan Laporan dan PM Evaluasi Kelembagaan dan Kematangan Organisasi dari Biro Organisasi SETDA Jateng



Gambar 3. 5 Aplikasi Sanja Simbak untuk Maturitas Kelembagaan

b. Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi

Pada indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi, penetapan target menggunakan metode kumulatif, sehingga penetapan target per triwulan ditetapkan dari target 1 (satu) tahun dibagi 4 (empat). Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa asing-masing target pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dapat tercapai. Berikut jika ditampilkan dalam bentuk chart:



Gambar 3. 6 Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi

Jika dibandingkan target dan realisasi kinerja pada indikator persentase peningkatan Kerjasama daerah yang terimplementasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kerjasama Daerah yang Terimplementasi Tahun 2021-2023

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	N/A	N/A	5	12,55	8	34,02

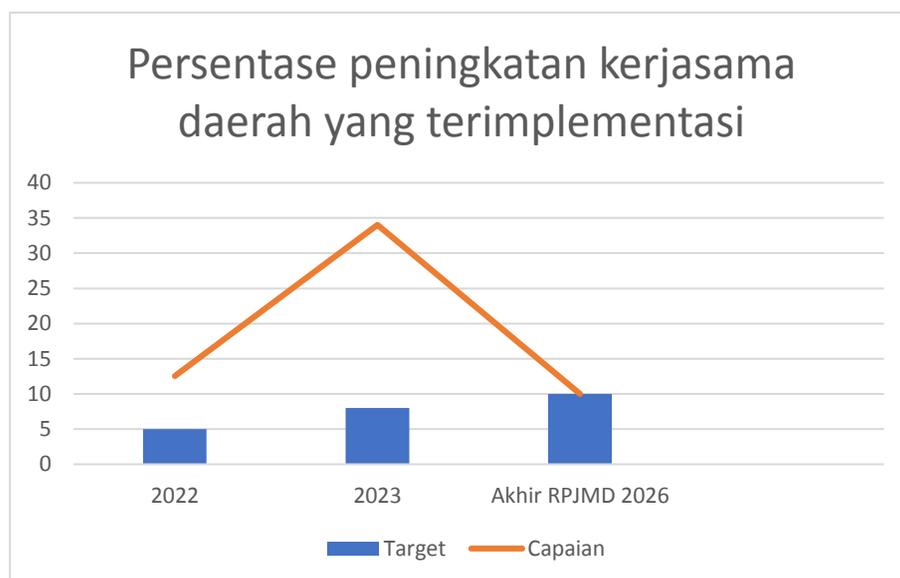
Dari tahun 2021 hingga 2023 target Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dapat diraih bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022.

Berikut perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada sasaran sasaran strategis Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	N/A	N/A	N/A	5	12,55	251,00	8	34,02	425,25	10	340,20

Indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi pada tahun 2023 mendapatkan capaian 425,25% dimana persentase yang ditargetkan sebesar 8 sedangkan realisasi mencapai 34,02. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capainya sudah 340,20% dari nilai tager RPJMD pada indikator presentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi sebesar 10. Pencapaian tersebut didukung adanya berbagai upaya yang telah dilakukan seperti melakukan pemetaan potensi kerjasama daerah, pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), peningkatan kapasitas personil serta sosialisasi dan monitoring, evaluasi kerjasama daerah. Berikut capaian Indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi dengan Akhir RPJMD jika ditampilkan dalam bentuk chart.



Gambar 3. 7 Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi

Dalam pencapaian indikator Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi, Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan berusaha semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dari segi sumber daya manusia, Bagian Tata Pemerintahan memiliki 12 pegawai ASN dan 4 pegawai non ASN. Selain itu, seluruh kegiatan dalam mencapai target tersebut juga didukung adanya anggaran yang telah ditetapkan. Berikut realisasi anggaran yang digunakan pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah:

Tabel 3. 8 Realisasi Anggaran Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi
			Sebelum	Setelah	Selisih	
71	Fasilitasi Kerjasama Daerah		928.928.500	813.208.500	(115.720.000)	678.055.623
72	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		359.284.500	413.964.500	54.680.000	384.355.293
		Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam Negeri	47.700.000	118.740.000	71.040.000	116.457.500,00
		Fasilitasi kegiatan Kerja Sama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	55.936.000	55.936.000	0	49.852.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tahunan TKKSD	50.356.000	50.356.000	0	37.360.000
		Penyelenggaraan Workshop/FGD penyelesaian permasalahan kerjasama daerah		0	0	
		Penyediaan Jasa Upgrade/ Pemeliharaan Sistem Informasi MAKAN JADAH	26.370.000	0	(26.370.000)	
		Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama Dalam Negeri	59.246.000	59.246.000	0	51.727.370
		Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam Keanggotaan APEKSI dan APEKSI Komwil III	40.020.000	50.030.000	10.010.000	50.002.900
		Konsultasi dan Rapat Koordinasi Luar Daerah Dalam Rangka Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	79.656.500	79.656.500	0	78.955.023
73	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		477.574.000	332.854.000	(144.720.000)	233.477.197
		Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Kerjasama Daerah dengan Pihak Luar Negeri	18.830.000	18.830.000	0	10.014.000,00
		Pengurusan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri	22.500.000	22.500.000	0	20.125.572
		Fasilitasi Rapat Antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Terkait Pembahasan Naskah Kerja Sama Sister City	57.000.000	57.000.000	0	
		Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam UCLG ASPAC dan OWHC-AP	100.000.000	100.000.000	0	93.349.425

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi
			Sebelum	Setelah	Selisih	
		Penyediaan Surakarta City Profile Video		0	0	
		Penyediaan Cetak Buku Surakarta City Profile	94.604.000	0	(94.604.000)	
		Penerimaan Kunjungan Tamu Asing ke Kota Surakarta	50.116.000	0	(50.116.000)	
		Penyediaan Souvenir Bagi Pihak Luar Negeri	16.564.000	16.564.000	0	14.828.200
		Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Potensi Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri		0	0	
		Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Acara GYCF		0	0	
		Workshop Teknik Negosiasi, Penyusunan Naskah dan Korespondensi Kerjasama Luar Negeri	117.960.000	117.960.000	0	95.160.000
		Penyelenggaraan sosialisasi prosedur perjalanan dinas ke luar negeri		0	0	
74	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		92.070.000	66.390.000	(25.680.000)	59.259.283
		Desk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	13.490.000	13.490.000	0	13.490.000
		Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	50.356.000	50.356.000	0	43.383.283
		Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	2.544.000	2.544.000	0	2.386.000
		Upgrade Website Bagian Tata Pemerintahan	25.680.000	0	(25.680.000)	
		Konsultasi dan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah		0	0	

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi pengurangan anggaran pada kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah sebesar Rp 115.720.000,00 dari pagu yang semula Rp 928.928.500,00 menjadi Rp 813.208.500,00. Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan berusaha memaksimalkan efisiensi anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan. Dari anggaran tersebut, Bagian Tata Pemerintahan merealisasikan anggaran sebesar Rp 678.055.623,00 atau sebesar 83,38% serapan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Tercapainya target kerja sama daerah yang terimplementasi, dilakukan dengan upaya:

- Pemetaan potensi kerja sama daerah
- Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) melalui rapat pleno kerja sama daerah dan pelibatan TKKSD dalam penyusunan naskah kerja sama daerah
- Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja sama
- Peningkatan kapasitas bagi personil yang menangani kerja sama di Perangkat Daerah berupa Workshop Kerja Sama Luar Negeri
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yakni dengan desk implementasi kerja sama daerah
- Sosialisasi hasil monev kerja sama daerah



Gambar 3. 8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah Kota Surakarta

2. Sasaran Strategis Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah

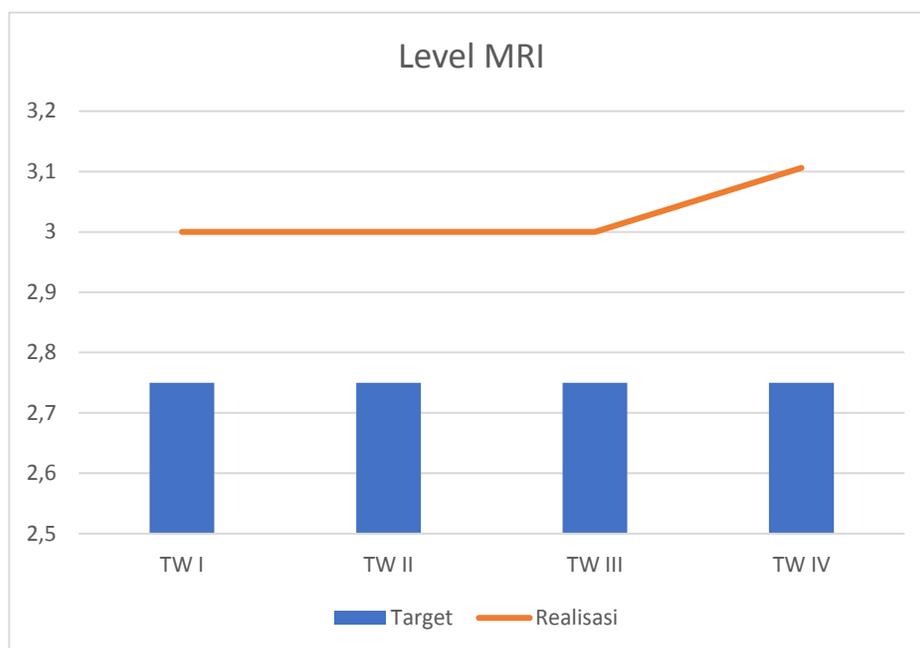
Pada sasaran strategis mengelola risiko dan potensi sumberdaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah memiliki satu indikator, yaitu nilai MRI dengan progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 9 Proges Capaian Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis Mengelola Risiko dan Potensi Sumberdaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Tujuan Pemerintah Daerah

NO	Indikator	Satuan	TARGET					TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian	Predikat									
1	Level MRI	Level	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	3	109,09	Sangat berhasil	3	109,09	Sangat berhasil	3	109,09	Sangat berhasil	3,106	112,95	Sangat berhasil

a. Level MRI

Target level MRI Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 adalah 2,75. Level MRI adalah hasil pemeringkatan yang dilakukan setahun sekali, sehingga target tiap triwulan dipasang sesuai dengan target tahunan dimana realisasi triwulan I - III masih menggunakan nilai tahun 2022 yaitu sebesar 3. Level MRI Tahun 2023 keluar pada triwulan IV dengan nilai 3,106. Progres capaian level MRI kelembagaan per triwulan sebagaimana terlihat dalam chart di bawah ini:



Gambar 3. 9 Level MRI

Level MRI Kelembagaan Pemerintah Kota Surakarta jika dibandingkan target dan realisasi kinerja untuk indikator level MRI tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Level MRI tahun 2021-2023

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Level MRI	Level	N/A	N/A	2,5	3	2,75	3,106

Realisasi level MRI tahun 2023 diangka 3,106 dari target yang ditetapkan sebesar 2,75. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, perolehan tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,106. Secara realisasi mengalami peningkatan, akan tetapi jika dihitung secara capaian mengalami penurunan sebesar 7%. Level MRI baik secara capaian jika dibandingkan dengan target RPJMD sudah mencapai 103,53%. Berikut perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada sasaran sasaran strategis mengelola risiko dan potensi sumberdaya pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

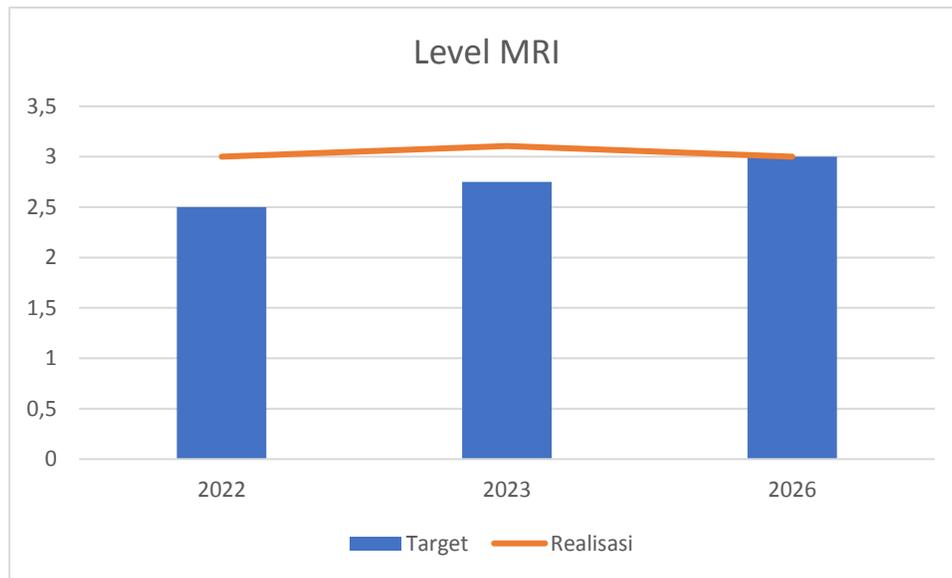
Tabel 3. 11 Perbandingan Capaian Level MRI dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Level MRI	Level	N/A	N/A	N/A	2,5	3	120,00	2,75	3,106	112,95%	3	103,53%

Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah terdapat 1 indikator yaitu Nilai MRI. Berdasarkan penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2023 pada pemerintah Kota Surakarta memenuhi skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,106. Nilai ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 2,75 dengan nilai capaian 112,95%. Jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capainya sudah 103,53%. Dijadikannya Pemkot Surakarta sebagai Percontohan Kota/Kab lain di Jawa Tengah dalam pengelolaan Maturitas SPIP Terintegrasi sehingga mendorong Pemkot Surakarta untuk melakukan percepatan pengelolaan risiko sehingga sudah terbentuk tahap-tahap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Meskipun telah mencapai target yang diharapkan, beberapa konten dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, diantaranya kategori skala dampak risiko masih bersifat terlalu subyektif, belum menggambarkan kategori yang dapat dikuantitatifkan (jelas, dapat diukur, spesifik), serta skala nilai risiko belum menggambarkan strategi dan upaya organisasi dalam merespon risiko secara tepat dan logik model.

Berikut capaian indikator level MRI dengan akhir RPJMD jika ditampilkan dalam bentuk chart:



Gambar 3. 10 Capaian Indikator Level MRI dengan Akhir RPJMD

Salah satu aktivitas yang mengalami pengurangan anggaran adalah aktivitas Pengelolaan Manajemen Risiko dari Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Berikut rincian anggaran pada kegiatan administrasi pembangunan:

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Kegiatan Administrasi Pembangunan

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran(Rp)			Total Realisasi
			sebelum	setelah	selisih	
	Administrasi Pembangunan		520.388.000	445.858.000	(74.530.000)	416.342.857
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		100.390.000	84.210.000	(16.180.000)	80.752.000
		Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta	39.430.000	23.250.000		
		Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta	60.960.000	60.960.000		
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		332.368.000	274.018.000	(58.350.000)	255.140.857
		Pelatihan Aplikasi Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi	7.400.000	7.400.000		
		Pemeliharaan Aplikasi Simdalbangda dan Simonela	48.680.000	48.680.000		
		Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi Program Pembangunan Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta	24.743.000	24.743.000		
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	116.855.000	109.105.000		
		Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Bankeu Provinsi	2.040.000	2.040.000		
		Pengelolaan Manajemen Risiko	132.650.000	82.050.000	(50.600.000)	
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		87.630.000	87.630.000	0	80.450.000
		Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	87.630.000	87.630.000		

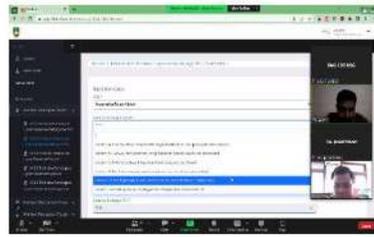
Anggaran yang semula Rp 132.650.000,00 mengalami pemangkasan anggaran hingga menjadi Rp 52.050.000,00. Meskipun mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 50.600.000,00 target Indikator Kinerja Level MRI dapat tercapai, bahkan melebihi target. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan adanya

pengurangan anggaran tidak berpengaruh signifikan akan pencapaian kinerja. Pada indikator level MRI, tidak terdapat perubahan dan efek yang signifikan dengan berkurangnya anggaran. Metode pengendalian menggunakan metode lain yang lebih mengefisiensi anggaran, dilakukan dengan cara daring, baik dalam pelaksanaan konsultasi, sosialisasi dan desk pengendalian, walaupun sebenarnya lebih efektif jika dilaksanakan tatap muka sehingga target dapat tercapai

Tercapainya target nilai level MRI di Pemerintah Kota Surakarta karena dilakukannya beberapa upaya-upaya diantaranya:

- Dilakukannya sosialisasi terkait dengan Manajemen Risiko kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta melalui Daring maupun Luring dengan mendatangkan narasumber dari BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan komitmen pejabat terkait dengan Pengelolaan Risiko;
- Pimpinan dan jajaran mulai memahami akan arti pentingnya Manajemen Risiko yang ditunjukkan dengan aksi-aksi pembuktian yang relevan dengan RTP yang dikelola dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan MR (bimtek MR, review MR dan lain sebagainya);
- Memberikan pendampingan kepada OPD secara intensif dengan membagi Tim Unit Kepatuhan menjadi beberapa PIC, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi OPD dapat segera terselesaikan dan pelaporan terkait dengan pengelolaan risiko bisa tepat waktu
- Melakukan kolaborasi antara SAKIP (Bagian Organisasi) dengan Manajemen Risiko, yaitu jika prosentase capaian dari e-SAKIP nilainya dibawah 70%, selanjutnya melakukan pencatatan kejadian di aplikasi SARKEMIS untuk mitigasi risiko di tahun selanjutnya;
- Berkoordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penilai Manajemen Risiko, baik daring maupun luring; dan
- Mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi SARKEMIS dan akan mengintegrasikan dengan sistem SPIP Inspektorat.

Berikut beberapa bukti dukung kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Daerah dalam mencapai level MRI sesuai target:



Gambar 3. 11 Pelaksanaan Sosialisasi Kepada Seluruh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta



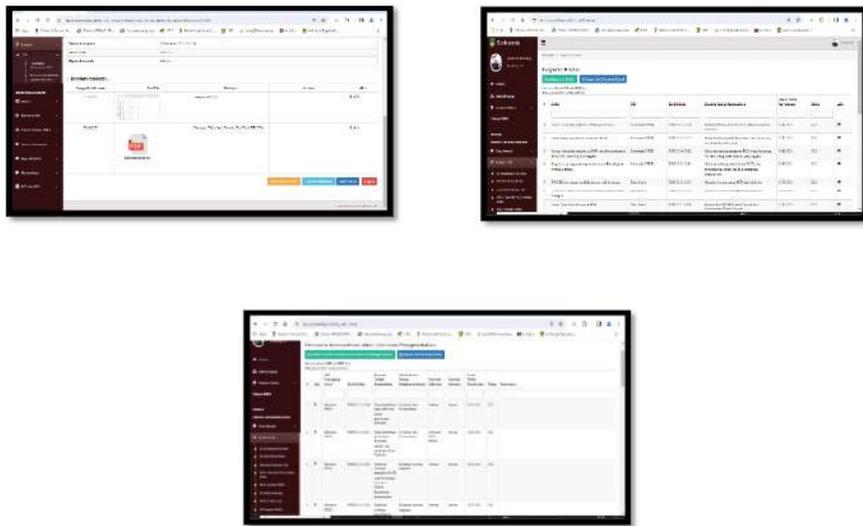
Gambar 3. 12 Pendampingan Terhadap OPD Terkait Pengelolaan Risiko



Gambar 3. 13 Kolaborasi Sakip (Bag. Organisasi) dan MR



Gambar 3. 14 Koordinasi Intensif dengan BPKP



Gambar 3. 15 Integrasi Aplikasi SARKEMIS dengan Sistem SPIP Inspektorat

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah

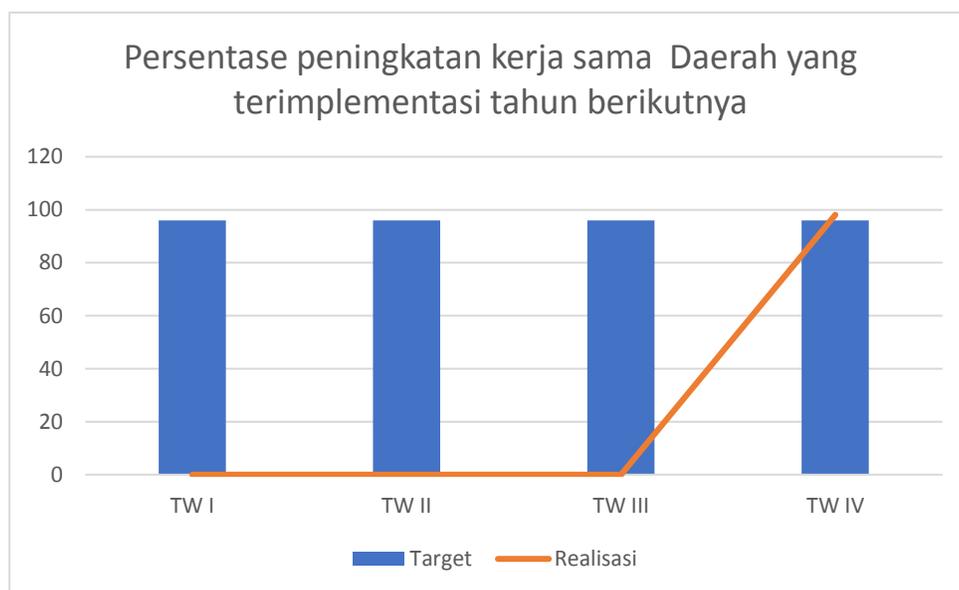
Pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah memiliki tiga indikator dengan progres capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 13 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	Indikator	Satuan	TARGET					TW I			TW II			TW III			TW IV		
			2023	TW I	TW II	TW III	TW IV	Realisasi	Capaian	Predikat									
1	Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96	96	96	96	96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88,06	91,73	Sangat berhasil
2	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	97,14	Sangat berhasil	3,41	97,43	Sangat berhasil	3,41	97,43	Sangat berhasil	3,57	102,00	Sangat berhasil
3	Nilai SAKIP	Nilai	80	70,34	70,34	70,34	70,34	70,34	100	Sangat berhasil	70,34	100	Sangat berhasil	70,34	100	Sangat berhasil	70,81	88,51	Sangat berhasil
Rata-Rata Capaian									N/A			N/A		N/A				94,08	

a. Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya

Untuk indikator Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya, penetapan target menggunakan metode non kumulatif, dan penghitungan realisasi pada triwulan IV sehingga pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tidak ditetapkan targetnya. Anggaran kegiatan fasilitasi kerjasama daerah mengalami penurunan sehubungan dengan kebijakan *refocusing* anggaran. Pada Triwulan IV Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar 88,06 dari target pada tahun 2023 sebesar 96. Progres capaian Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya sebagaimana terlihat dalam chart di bawah ini:



Gambar 3. 16 Persentase peningkatan kerjasama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya

Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya jika dibandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	N/A	N/A	95	90,8	96	91,73

Dalam tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi pada 2023 menunjukkan nilai sebesar 91,73. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 90,8 maka mengalami peningkatan.

Nilai realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena nilai realisasi pada tahun 2021 tidak tersedia. Sehingga dapat diketahui bahwa perbandingan realisasi persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya meningkat sebesar 0,93.

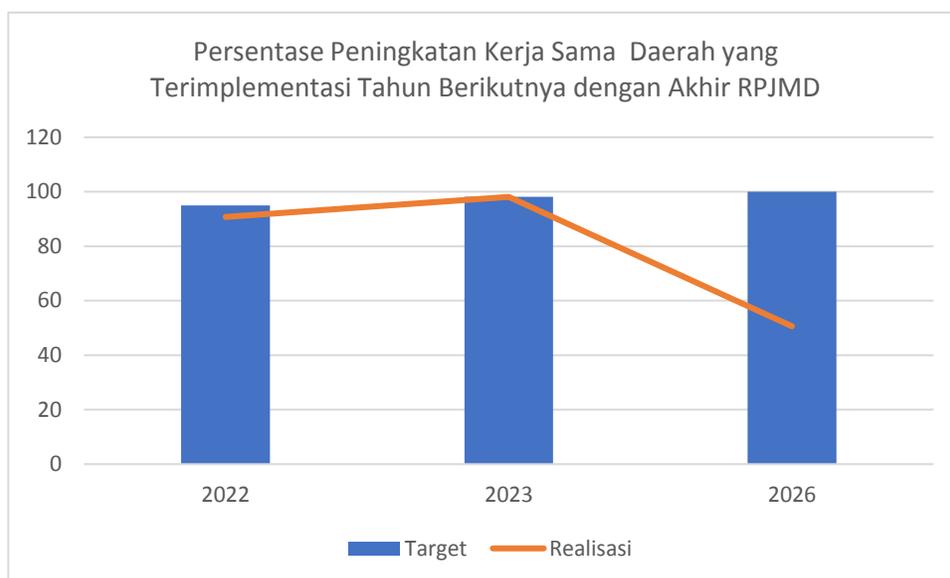
Perbandingan realisasi dengan capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif dengan target jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026.

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya 2023 dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	N/A	N/A	N/A	95	90,8	95,58	96	88,06	91,73	100	88,06

Indikator Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya pada tahun 2023 mendapatkan capaian 91,73%, dimana persentase yang ditargetkan sebesar 96, sedangkan realisasi mencapai 88,06. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaiannya sudah 88,06% dari nilai target RPJMD pada indikator Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya sebesar 100.

Berikut capaian indikator persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya dengan akhir RPJMD jika ditampilkan dalam bentuk chart:



Gambar 3. 17 Persentase Peningkatan Kerja Sama Daerah yang Terimplementasi Tahun Berikutnya dengan Akhir RPJMD

Pencapaian tersebut didukung adanya berbagai upaya yang telah dilakukan seperti melakukan pemetaan potensi kerjasama daerah, pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD), peningkatan kapasitas personil serta sosialisasi dan monitoring, evaluasi kerjasama daerah.

Tercapainya target kerja sama daerah yang terimplementasi, dilakukan dengan upaya:

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama yakni dengan desk implementasi kerja sama daerah
- Sosialisasi hasil monev kerja sama daerah
- Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerja sama
- Peningkatan kapasitas bagi personil yang menangani kerja sama di Perangkat Daerah berupa Workshop Kerja Sama Luar Negeri
- Pemetaan potensi kerja sama daerah
- mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) melalui rapat pleno kerja sama daerah dan melibatkan TKKSD dalam penyusunan naskah kerja sama daerah

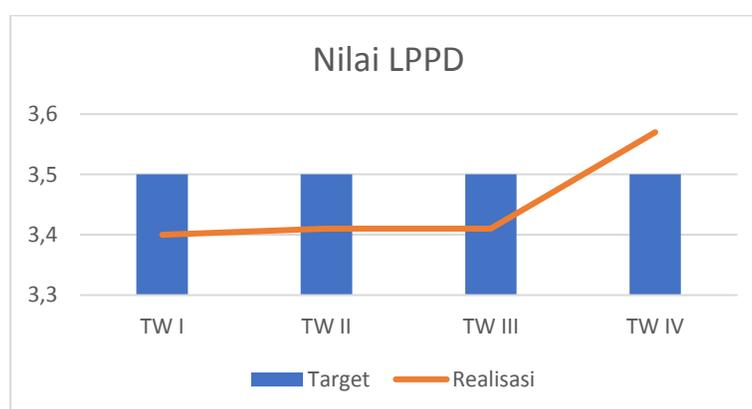


Gambar 3. 18 Pemetaan Potensi Kerjasama Daerah

b. Nilai LPPD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Keberadaan LPPD menjadi cukup penting dalam kerangka sistem pelaporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sehubungan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mengintegrasikan muatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sistematika pelaporan LPPD dan menjadikan nilai LPPD sebagai komponen dalam penghitungan tambahan penghasilan pegawai.

Realisasi tersebut merupakan skor Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditetapkan pada 18 April 2023. Proges capaian antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 untuk indikator Nilai LPPD per triwulan disajikan dalam chart di bawah ini:



Gambar 3. 19 Progres Capaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 untuk Indikator Nilai LPPD per Triwulan

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Nilai LPPD tahun 2021-2023

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai LPPD	Nilai	3,35	3,4035	3,4	3,4035	3,5	3,57

Dari tahun 2021 hingga 2023 target nilai LPPD dapat diraih bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi nilai LPPD pada tahun 2023 meningkat 0,17 dari tahun 2022.

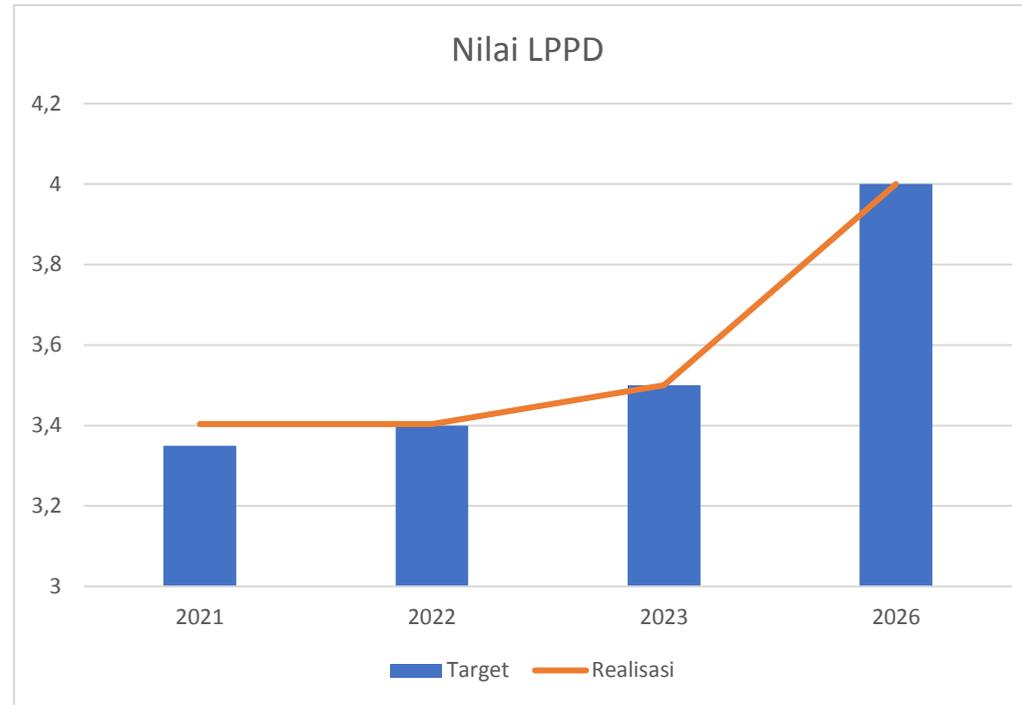
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Nilai LPPD dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai LPPD	Nilai	3,35	3,4035	101,60	3,4	3,4035	100,10	3,5	3,57	102	4	89,25

Untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah pusat memberikan standar berupa indikator kinerja kunci (IKK) yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah Daerah baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Implementasinya di Pemerintah Kota Surakarta, IKK berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan bermuara pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2023, Pemerintah Kota Surakarta meraih nilai LPPD 3,5718 dan peringkat ke dua untuk kategori Kota. Dengan perolehan nilai LPPD tersebut, capaian nilai LPPD tahun 2023 sebesar 102% dari target yang direncanakan sebesar 3,5 dengan nilai realisasi sebesar 3,57. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaiannya sebesar 89,25%. Untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah pusat memberikan standar berupa indikator kinerja kunci (IKK) yang dapat diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah Daerah baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Implementasinya di Pemerintah Kota Surakarta, IKK berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 telah diintegrasikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan bermuara

pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Meskipun nilai realisasinya belum mencapai target yang diinginkan, beberapa upaya telah dilakukan seperti asistensi dalam penyusunan laporan, koordinasi dengan Biro Pemerintahan, Kerjasama Otda Setda Provinsi Jawa Tengah. Berikut chart capaian Nilai LPPD jika disandingkan dengan target akhir RPJMD:



Gambar 3. 20 Perbandingan Capaian Nilai LPPD dengan Akhir RPJMD

Pada indikator nilai LPPD, anggaran dalam aktivitas penyusunan LPPD mengalami penurunan sehubungan dengan kebijakan refocusing anggaran. Meskipun mengalami penurunan anggaran, nilai LPPD dapat diraih dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Metode yang digunakan meliputi asistensi atau pendampingan serta komunikasi yang intens saat proses penyusunan LPPD. Secara anggaran, penyusunan dokumen LPPD merupakan aktivitas pada sub kegiatan asistensi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi
			Sebelum	Setelah	Selisih	
1	Administrasi Tata Pemerintahan		16.840.217.065	1.465.602.000	(15.374.615.065)	1.403.865.326
2	Penataan Administrasi Pemerintahan		-	-		-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu		0	0	
3	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		16.274.077.065	910.886.000	(15.363.191.065)	870.219.891
		Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kecamatan	94.110.000	107.830.000	13.720.000	103.666.050,00
		Pemeliharaan Pilar Batas Daerah	30.680.000	30.680.000	0	30.580.131,00
		Penamaan Unsur Rupabumi	160.680.000	80.680.000	(80.000.000)	79.739.750,00
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	311.476.000	362.517.000	51.041.000	337.534.000,00
		Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan TMMD dan KBD	35.600.000	53.682.000	18.082.000	52.266.000,00
		Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan KBD	0	0	0	
		Sosialisasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	101.930.000	104.480.000	2.550.000	100.715.000,00
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DPK	69.515.000	19.038.000	(50.477.000)	18.735.000,00
		Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	69.700.000	10.525.000	(59.175.000)	10.348.500,00
		Pemutakhiran Data Profil Kelurahan	101.200.000	87.702.000	(13.498.000)	86.020.000,00
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	162.865.000	0	(162.865.000)	
		Fasilitasi Penyelesaian Konflik Kewilayahan	24.700.000	19.582.000	(5.118.000)	17.749.300,00
		Hibah Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	15.111.621.065	0	(15.111.621.065)	
		Penyediaan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	30.000.000	30.000.000	29.400.000,00
		Penyediaan Bahan Bakar Minyak	0	4.170.000	4.170.000	3.466.160,00
4	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		566.140.000	554.716.000	(11.424.000)	533.055.435
		Penyusunan Dokumen Laporan Penerapan SPM	102.150.000	126.638.000	24.488.000	117.596.000,00
		Penyusunan Dokumen Monev Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ		0	0	
		Penyusunan Dokumen LPPD	135.210.000	108.428.000	(26.782.000)	105.166.100
		Penyusunan Dokumen LKPJ Walikota	117.240.000	111.940.000	(5.300.000)	105.338.000,00
		Penyusunan Dokumen dan Penayangan RLPPD	178.210.000	177.030.000	(1.180.000)	174.640.000
		Penyusunan Dokumen Pedoman Laporan Kinerja		0	0	
		Pemeliharaan Aplikasi LKPJ	33.330.000	30.680.000	(2.650.000)	30.315.335

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan anggaran pada aktivitas penyusunan dokumen LPPD sebesar Rp 26.782.000,00 dari pagu awal

sebesar Rp 135.210.000,00 menjadi 108.428.000,00 yang disebabkan kebijakan refocusing anggaran. Sedangkan dari segi serapan anggaran mencapai 96,99 % dengan nominal Rp 105.338.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai nilai LPPD melalui kegiatan yang diupayakan seperti:

- Asistensi Penyusunan LPPD
- Pendampingan dalam penyusunan bukti dukung
- Koordinasi antar Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD
- Konsultasi dengan Biro Pemerintahan, Kerjasama dan Otda Setda Prov Jateng
- Konsultasi pengalaman baik strategi penyusunan maupun teknis penyusunan bukti dukung ke daerah yang berprestasi

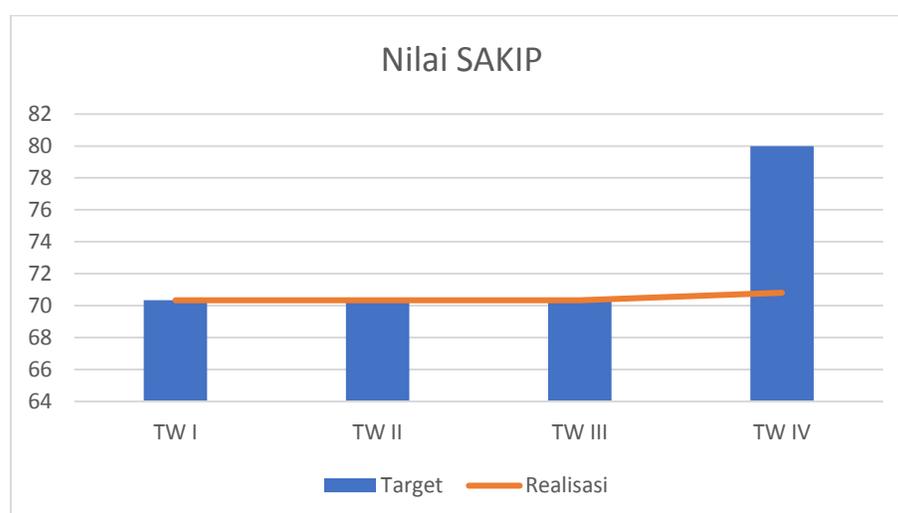


Gambar 3. 21 Asistensi Penyusunan LPPD

c. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) OPD diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Nilai SAKIP merupakan indikator yang sifatnya tahunan. Nilai SAKIP Tahun 2023 dikeluarkan oleh KEMENPAN RB pada 27 Desember 2023 sehingga perhitungan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III masih menggunakan Nilai SAKIP Tahun 2022. Karena Nilai SAKIP Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023, sehingga perhitungan target pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III disamakan dengan Nilai SAKIP Tahun 2022. Progres capaian per triwulan untuk indikator nilai SAKIP dapat dilihat pada chart di bawah ini:



Gambar 3. 22 Progres Capaian per Triwulan untuk Indikator Nilai SAKIP

Sekretariat Daerah Kota Surakarta memperoleh memperoleh 75 untuk SAKIP Tahun 2022. Namun laporan ini disusun, nilai SAKIP 2023 belum keluar sehingga belum dapat disajikan capaian Nilai SAKIP. Untuk sementara digunakan nilai 78,46 untuk menghitung capaian nilai SAKIP 2023. Berikut perbandingan realisasi nilai SAKIP tahun 2021-2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP tahun 2021-2023

NO	Indikator	Satuan	2021		2022		2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	Nilai	69,26	69,26	75	75	80	70,81

Realisasi indikator nilai SAKIP pada tahun 2023 sebesar 70,81 dari target yang telah ditentukan sebesar 80. Ketidakberhasilan realisasi nilai SAKIP dikarenakan permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

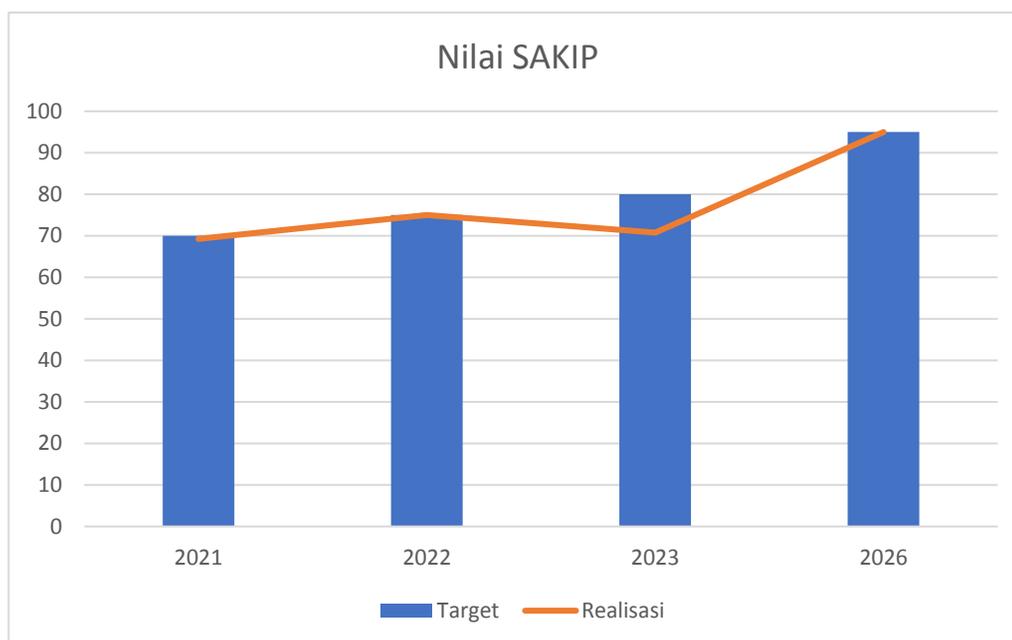
- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat daerah
- b. Budaya kerja yang terinternalisasi pada masing-masing perangkat daerah belum maksimal.
- c. Tuntutan hasil evaluasi AKIP semakin baik dan berkualitas.
- d. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
- e. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- f. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Pencapaian nilai SAKIP didorong dengan adanya kelengkapan dokumen perencanaan yang meliputi keberadaan RPJMD Tahun 2021-2026, Renstra Perangkat Daerah lengkap dengan cascading, pohon kinerja, dan cross cutting program. Selain itu, Perjanjian Kinerja dari level eselon II hingga eselon IV memberikan bukti adanya komitmen Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta untuk menjaga konsistensi indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Renja dan pelaksanaan penganggaran pada DPA. Ditambah lagi dengan penyajian dokumen capaian kinerja LkjiP Tahun 2022 yang menyajikan data capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMD Tahun 2021-2026 memberikan gambaran bahwa terdapat korelasi antara kedua dokumen perencanaan jangka menengah tersebut dengan adanya beberapa indikator kinerja yang masih digunakan dalam 5 tahun ke depan.

Tabel 3. 20 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Akhir RPJMD

NO	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	70	69,26	98,94	75	75	100,00	80	70,81	88,51	95	74,54

Indikator Nilai SAKIP tahun 2023 mendapatkan capaian 88,51 dari target yang direncanakan sebesar 80 dengan nilai realisasi sebesar 70,81. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, capaiannya sebesar 74,54%. Nilai SAKIP merupakan indikator yang sifatnya tahunan. Nilai SAKIP Tahun 2023 dikeluarkan oleh KEMENPAN RB pada 27 Desember 2023 sehingga perhitungan pada TW I sampai dengan TW III masih menggunakan Nilai SAKIP Tahun 2022. Karena Nilai SAKIP Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2023, sehingga perhitungan target pada TW I sampai dengan TW III disamakan dengan Nilai SAKIP Tahun 2022. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target nilai SAKIP adalah pohon kinerja belum sepenuhnya mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja, sehingga pada sebagian pohon kinerja teridentifikasi masih terpaku pada perencanaan yang telah ada serta masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*) dan cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 23 Perbandingan Capaian Nilai SAKIP dengan Akhir RPJMD

Secara garis besar, Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2023 telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran maupun metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan.

Dari segi sumber daya manusia, Sekretariat Daerah memiliki aset berupa pegawai yang mempunyai kualifikasi serta kompetensi yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjamin hal tersebut di atas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur bahwa pengelolaan ASN didasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sedangkan dari segi anggaran, berikut rincian anggaran pada kegiatan penataan organisasi:

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Kegiatan Penataan Organisasi

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi
			Sebelum	Setelah	Selisih	
1	Penataan Organisasi		2.306.102.700	1.853.846.954	(452.255.746)	1.821.957.112
2	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		774.804.000	701.914.000	(72.890.000)	691.415.103
		Evaluasi Kelembagaan	204.477.000	112.677.000	(91.800.000)	109.538.003
		Penyusunan Dokumen Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	168.768.900	194.128.900	25.360.000	191.923.400
		Penyusunan Dokumen SKJ di Pemerintah Kota	333.666.100	333.216.100	(450.000)	329.489.650
		Penyusunan Perkada Tambahan Penghasilan ASN	67.892.000	61.892.000	(6.000.000)	60.464.050
3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		409.028.700	161.620.200	(247.408.500)	157.401.900

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Aktivitas	Anggaran (Rp)			Total Realisasi
			Sebelum	Setelah	Selisih	
		Pendampingan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	180.424.980	121.395.200	(59.029.780)	118.428.900
		Penyusunan Peraturan Walikota Penyelenggaraan Pelayanan Publik		0	0	0
		Sekretariat Supervisi Penanganan COVID-19	78.603.720	12.505.000	(66.098.720)	12.253.000
		Penyusunan Perkada Jam Kerja Pemerintah Kota Surakarta	150.000.000	27.720.000	(122.280.000)	26.720.000
4	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		341.012.000	283.105.354	(57.906.646)	277.567.004
		Fasilitasi Reformasi Birokrasi	241.012.000	194.765.354	(46.246.646)	191.028.104
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	100.000.000	88.340.000	(11.660.000)	86.538.900
5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan T ata Laksana		537.039.000	466.963.400	(70.075.600)	459.201.015
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	118.730.000	118.730.000	0	115.853.000
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKM di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	194.405.000	129.414.400	(64.990.600)	126.969.650
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	99.294.000	101.174.000	1.880.000	98.720.490
		Pemeliharaan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	124.610.000	117.645.000	(6.965.000)	42.452.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		244.219.000	240.244.000	(3.975.000)	236.372.090
		Penyusunan LKIP dan PK Pemerintah Kota Surakarta	244.219.000	240.244.000	(3.975.000)	236.372.090

Pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp 3.975.000,00. Pengurangan tersebut merupakan pengurangan pada aktivitas belanja cetak. Pengurangan tidak berpengaruh akan capaian nilai SAKIP. Berapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai sakip antara lain:

- Terdapat integrasi sistem antara SIPPD dan ESAKIP untuk perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja (penyusunan PK, RKT, Pengisian capaian kinerja secara triwulanan, dan analisis capaian)
- Workshop Aplikasi E-SAKIP Kota Surakarta Tahun 2023 dengan narasumber Dr. Rutiana Dwi Wahyuningsih S.Sos.,M.si dari UNS yang memberikan materi tentang penjenjangan kinerja. Workshop dilaksanakan pada 5-6 April 2023 diikuti oleh seluruh OPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- Dilakukan perbaikan penjenjangan kinerja dengan mengidentifikasi critical success factor (CSF)



Gambar 3. 24 Aplikasi ESAKIP yang terintegrasi dengan SIPPD



Gambar 3. 25 Workshop Aplikasi E-SAKIP Kota Surakarta Tahun 2023

B. REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2023 melaksanakan 19 kegiatan yang tercakup dalam 3 program, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Seluruh program kegiatan ditujukan untuk mencapai 6 (enam) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Meskipun telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Sekretariat Daerah Kota Surakarta secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2023 seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Surakarta melampaui target. Berikut rincian anggaran sebelum dan setelah perubahan serta realisasinya. Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dari 9 Bagian di Sekretariat Daerah d tampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	79,021,345,980.00	61,499,188,518.00	57,814,670,109.00
SEKRETARIAT DAERAH	79,021,345,980.00	61,499,188,518.00	57,814,670,109.00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49,741,949,957.00	48,929,328,763.00	36,457,329,849.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167,943,794.00	157,488,794.00	120,176,950.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152,943,794.00	152,943,794.00	115,868,200.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	4,545,000.00	4,308,750.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,367,467,173.00	21,391,116,876.00	20,208,715,802.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21,299,587,173.00	21,323,236,876.00	20,147,927,377.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	67,880,000.00	67,880,000.00	60,788,425.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	493,752,700.00	347,153,425.00	339,712,240.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91,010,000.00	91,010,000.00	89,570,000.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	382,277,700.00	224,351,900.00	221,446,240.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20,465,000.00	31,791,525.00	28,696,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,223,920,702.00	2,202,220,499.00	2,000,504,137.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96,108,657.00	97,550,040.00	96,451,289.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167,899,061.00	167,760,596.00	160,574,403.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	95,157,400.00	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	239,296,429.00	214,301,878.00	222,098,585.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,760,000.00	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	24,924,000.00	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,527,775,155.00	1,702,140,785.00	1,521,379,860.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60,000,000.00	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,322,694,125.00	825,551,000.00	797,450,900.00
Pengadaan Mebel	421,218,500.00	291,756,000.00	288,749,900.00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	645,629,625.00	460,292,000.00	435,921,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	255,846,000.00	73,503,000.00	72,780,000.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,292,551,890.00	9,659,986,990.00	9,356,692,421.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46,226,000.00	54,304,560.00	50,667,357.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,122,328,000.00	3,978,755,550.00	3,749,346,670.00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202,290,600.00	193,055,600.00	175,540,175.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,921,707,290.00	5,433,871,280.00	5,381,138,219.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,039,769,600.00	4,281,255,350.00	4,151,572,317.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,425,120,000.00	1,435,820,000.00	1,398,352,300.00
Pemeliharaan Mebel	96,818,350.00	80,818,350.00	63,552,425.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,669,757,500.00	1,789,257,500.00	1,732,707,025.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	838,073,750.00	975,359,500.00	956,960,567.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	-	-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	995,714,860.00	987,106,860.00	886,089,484.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	873,419,860.00	873,419,860.00	773,898,884.00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77,295,000.00	113,687,000.00	112,190,600.00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45,000,000.00	-	-
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2,339,822,640.00	2,547,356,040.00	2,431,740,324.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	426,556,000.00	482,553,000.00	474,384,350.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	326,110,000.00	245,110,000.00	237,891,848.00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,587,156,640.00	1,819,693,040.00	1,719,464,126.00
Penataan Organisasi	2,306,102,700.00	1,853,846,954.00	1,821,957,112.00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	774,804,000.00	701,914,000.00	691,415,103.00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	409,028,700.00	161,620,200.00	157,401,900.00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	341,012,000.00	283,105,354.00	277,567,004.00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	537,039,000.00	466,963,400.00	459,201,015.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	244,219,000.00	240,244,000.00	236,372,090.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4,192,209,773.00	4,676,245,975.00	4,496,861,483.00
Fasilitasi Keprotokolan	1,074,234,612.00	1,373,028,562.00	1,340,157,980.00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,652,899,551.00	1,546,287,063.00	1,499,332,000.00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1,465,075,610.00	1,756,930,350.00	1,657,371,503.00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	27,474,078,868.00	11,166,392,755.00	9,883,175,639.00
Administrasi Tata Pemerintahan	16,840,217,065.00	1,465,602,000.00	1,403,865,326.00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	16,274,077,065.00	910,886,000.00	870,409,891.00
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	566,140,000.00	554,716,000.00	533,455,435.00
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6,497,614,503.00	6,388,371,455.00	5,895,450,500.00
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,486,463,515.00	4,421,335,500.00	3,942,810,150.00
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1,898,549,988.00	1,961,735,955.00	1,951,315,350.00
Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	112,601,000.00	5,300,000.00	1,325,000.00
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3,207,318,800.00	2,499,210,800.00	1,905,804,190.00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	353,130,200.00	320,130,200.00	283,730,980.00
Fasilitasi Bantuan Hukum	2,081,655,000.00	1,572,488,000.00	1,081,174,760.00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	772,533,600.00	606,592,600.00	540,898,450.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	928,928,500.00	813,208,500.00	678,055,623.00
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	359,284,500.00	413,964,500.00	385,319,143.00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	477,574,000.00	332,854,000.00	233,477,197.00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	92,070,000.00	66,390,000.00	59,259,283.00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,805,317,155.00	1,403,467,000.00	1,320,021,300.00
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	492,480,000.00	363,767,000.00	346,310,240.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	217,700,000.00	159,980,000.00	151,228,500.00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	42,670,000.00	59,015,000.00	57,797,050.00
Perencanaan dan Pengaw asan Ekonomi Mikro kecil	232,110,000.00	144,772,000.00	137,284,690.00
Administrasi Pembangunan	520,388,000.00	445,858,000.00	416,342,857.00
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100,390,000.00	84,210,000.00	80,752,000.00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	332,368,000.00	274,018,000.00	255,140,857.00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	87,630,000.00	87,630,000.00	80,450,000.00
Pengadaan Barang dan Jasa	503,011,370.00	325,603,000.00	317,656,322.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	142,051,000.00	146,966,000.00	145,039,722.00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	133,089,370.00	40,680,000.00	39,366,600.00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaaan Barang dan Jasa	227,871,000.00	137,957,000.00	133,250,000.00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)		TOTAL REALISASI
	Sebelum	Setelah	
Pemantauan Kebijakan T erkait Sumber Daya Alam	289,437,785.00	268,239,000.00	239,711,881.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	232,781,785.00	244,379,000.00	217,701,881.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	56,656,000.00	23,860,000.00	22,010,000.00
TOTAL	79,021,345,980.00	61,499,188,518.00	57,814,670,109.00

Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Surakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 79.021.345.980,00 yang dikelola oleh 9 Bagian di Sekretariat Daerah. Pagu tersebut mengalami penurunan sehubungan dengan kebijakan refocusing anggaran. Karena adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk pemenuhan anggaran, dilakukan refocusing anggaran pada bulan April 2023. Masing-masing bagian melakukan refocusing dan pergeseran anggaran yang bersifat tidak rutin hingga diperoleh total anggaran sebesar Rp 61.499.188.518,00 dengan total realisasi sebesar Rp 57.814.670.109,00 atau sebesar 94%.

C. PENCAPAIAN LAINNYA

Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Surakarta berhasil meraih penghargaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Peduli HAM Tahun 2022

Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan penghargaan sebagai Kota Peduli HAM Tahun 2022 atas dedikasi dan kerja keras dari Bagian Hukum Setda Kota Surakarta dengan dukungan berbagai pihak. Penghargaan tersebut diberikikan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 15 November 2023 di Jakarta.



Gambar 3. 26 Piagam Penghargaan Kota Peduli HAM Tahun 2022

2. Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Collaboration dan Engagement

Pada tahun 2023, Sekretaris Daerah Bapak Ir. Ahyani, MA menerima penghargaan sebagai Sekretaris Daerah Terbaik Kategori Collaboration dan Engagement dalam kejuaraan ADLGA (Askomsi Digital Leadership Government Award) 2023 di Jakarta pada tanggal 26-27 Juli 2023. Sekretaris Daerah Kota Surakarta dinilai berhasil dalam kepemimpinan digital meliputi kepemimpinan Sekda, budaya digital, inovasi proses bisnis serta prioritas layanan diital publik/administrasi. Penghargaan tersebut diperoleh dari ASKOMPSI (Aosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia)



Gambar 3. 27 Penghargaan Sekda Terbaik

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Capaian Tahun 2023

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai dengan rincian rata-rata capaian per sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Capain Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	133,24
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	425,25
2.	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Level MRI	112,95
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	91,50
		Nilai LPPD	102
		Nilai SAKIP	88,51
Rata-rata capaian			158,91

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dari 6 indikator ada sasaran terdapat dua indikator yang tidak tercapai atau mengalami perlambatan, yaitu indikator Presentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya (91,50%) dan Nilai SAKIP (88,51%). Capaian keseluruhan indikator jika dirata-rata pada tahun 2023 dikatakan sangat berhasil dengan perolehan angka capaian 158,91. Jika dilihat dari skala ordinal, capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dikatakan Sangat Berhasil.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, masing-masing indikator memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat yang berbeda-beda. Berikut faktor pendorong dan faktor penghambat untuk masing-masing indikator disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat untuk Masing-Masing Indikator

NO	Indikator	Satuan	2023			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	38	50,63	133,24	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendampingan secara intensif kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan membagi Tim Verifikator bagi OPD untuk melaksanakan penilaian mandiri b. Penyelenggaraan workshop terkait dengan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah c. Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah d. Pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi Sanja Simbak dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan maupun 	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan dan pengisian data mengalami peralihan dari tahun sebelumnya yang semula hanya manual utk tahun ini melalui aplikasi sanja simbak dan manual b. pergantian pegawai yang menangani terkait maturitas kelembagaan di beberapa OPD sehingga masih belum terlalu paham tentang penilaian maturitas kelembagaan c. kendala dalam beberapa variable yang terkait dengan diklat dan manajemen risiko pelaksanaan tugas perangkat daerah d. beberapa OPD masih kesulitan dalam melengkapi data dukung yang diperlukan karena berbagai faktor.

NO	Indikator	Satuan	2023			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		
						kesalahan sistem dalam aplikasi Sanja Simbak.	
2	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	8	15,99	199,88	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi kerja sama daerah b. Pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) c. Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama d. Peningkatan kapasitas personil e. Sosialisasi dan monev kerjasama daerah 	
3	Level MRI	Level	2,75	3,106	112,95	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi terkait dengan Manajemen Risiko kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta melalui Daring dan Luring b. pendampingan kepada OPD secara intensif dengan membagi Tim Unit Kepatuhan menjadi beberapa PIC 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko fraud dan beberapa OPD belum melakukan pemantauan atas RTP risiko kecurangan (fraud) dan masih terdapat beberapa tagging risiko fraud pada aplikasi SARKEMIS yang kurang tepat b. Belum seluruh pimpinan OPD ikut andil dalam peningkatan

NO	Indikator	Satuan	2023			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		
						<p>c. koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penilai MR</p> <p>d. Pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi SARKEMIS</p>	<p>kualitas substansi manajemen risiko melalui kegiatan Focus Group Discussion dalam melakukan Root Cause Analysis</p> <p>c. Akan dilakukan penambahan fitur dalam SARKEMIS dan Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan menekankan kepada Perangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP</p>

NO	Indikator	Satuan	2023			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		
4	Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96	98,11	102,20	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan potensi kerja sama daerah b. Pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) c. Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama d. Peningkatan kapasitas personil e. Sosialisasi dan monev kerjasama daerah 	
5	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,41	97,43	<ul style="list-style-type: none"> a. Asistensi Penyusunan LPPD b. dalam penyusunan bukti dukung c. Koordinasi antar Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD d. Konsultasi dengan Biro Pemerintahan, Kerjasama dan Otda Setda Prov Jateng e. Konsultasi pengalaman baik strategi penyusunan maupun teknis penyusunan bukti dukung ke daerah yang berprestasi 	

NO	Indikator	Satuan	2023			Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			Target	Realisasi	Capaian		
6	Nilai SAKIP	Nilai	80	78,46	98,07	<p>a. Terdapat integrasi sistem antara SIPPD dan ESAKIP untuk perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja</p> <p>b. Dilakukan perbaikan penjenjangan kinerja dengan mengidentifikasi <i>critical success factor (CSF)</i></p>	<p>a. pohon kinerja belum sepenuhnya mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja, sehingga pada sebagian pohon kinerja PD teridentifikasi masih terpaku pada perencanaan yang telah ada</p> <p>b. masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) dan cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.</p>

3. Total Efisiensi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Surakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 79.021.345.980,00. Dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Surakarta untuk pemenuhan anggaran, dilakukan refocusing anggaran pada bulan April 2023. Masing-masing bagian melakukan refocusing dan pergeseran anggaran yang bersifat tidak rutin hingga diperoleh total anggaran sebesar Rp 61.499.188.518,00 dengan total realisasi sebesar Rp 57.814.670.109,00 atau sebesar 94%. Sedangkan penggunaan anggaran untuk masing-masing indikator sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3 Total Efisiensi Anggaran Tahun 2023 untuk Masing-Masing Indikator

NO	Indikator	Satuan	2023			Nama Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota	Nilai	38	50,63	133,24	Penataan Organisasi	1.853.846.954	1.821.957.112	98,28
2	Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%	8	15,99	199,88	Fasilitasi Kerjasama Daerah	813.208.500	677.091.773	83,26
3	Level MRI	Level	2,75	3,106	112,95	Administrasi Pembangunan	445.858.000	416.342.857	93,38
4	Persentase peningkatan kerja sama Daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	96	98,11	102,20	Fasilitasi Kerjasama Daerah	813.208.500	677.091.773	83,26
5	Nilai LPPD	Nilai	3,5	3,41	97,43	Administrasi Tata Pemerintahan	1.465.602.000	1.403.275.326	95,75
6	Nilai SAKIP	Nilai	80	78,46	98,07	Penataan Organisasi	1.853.846.954	1.821.957.112	98,28
								Rata-rata	92,03

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KE DEPAN

1. Strategi Perencanaan berikutnya untuk mendukung pencapaian kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi capaian akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pengoptimalan potensi sumber daya dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah;

2. Program/kegiatan/subkegiatan dan aktivitas prioritas tahun 2025

Sekretariat Daerah telah menyusun Rencana Awal (Ranwal) 2025 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. 4 Rencana Awal Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS RANWAL 2025	Anggaran RANWAL 2025 (Rp)
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		82.103.969.270
2	SEKRETARIAT DAERAH		82.103.969.270
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		67.575.660.530
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		210.000.000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		160.000.000
		Bimtek Penyusunan Renja	50.000.000
		Diskusi Kelompok Terbatas Sekretariat Daerah	40.000.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	30.000.000
		Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	5.000.000
		Penyusunan Dokumen Renja Sekretariat Daerah	10.000.000
		Penyusunan Dokumen RTP Sekretariat Daerah	25.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000
		Koordinasi penyusunan laporan kinerja Setda	10.000.000

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulanan Sekretariat Daerah	25.000.000
		Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah	5.000.000
		Penyusunan LKPJ Sekretariat Daerah	5.000.000
		Penyusunan LPPD Sekretariat Daerah	5.000.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.050.000.000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23.900.000.000
		Honorarium pengelola BMD	100.000.000
		Honorarium pengelola keuangan	800.000.000
		Pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dan PPPK Sekretariat Daerah	23.000.000.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		150.000.000
		Penyusunan Laporan Keuangan	50.000.000
		Penyusunan RKA / DPA Murni dan Perubahan	50.000.000
		Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	50.000.000
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		630.500.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		120.000.000
		Pengadaan Pakaian Batik Bagian Umum	20.000.000
		Pengadaan Pakain Dinas Sekretariat Daerah	100.000.000
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		510.500.000
		Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah	4.000.000
		Evaluasi Kinerja Pegawai Bagian Umum	50.000.000
		Evaluasi Kinerja Pegawai SETDA	70.000.000
		Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	4.000.000
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Pendampingan Lomba Inovasi	4.000.000
		Forum Konsultasi Publik Review Proses Bisnis dan SOP	28.000.000
		Forum Konsultasi Standar Pelayanan	28.000.000
		ISO Sekretariat Daerah	90.000.000
		Makan Minum ISO Sekretariat Daerah	4.000.000

		Monitoring dan Evaluasi Review Proses Bisnis dan SOP	25.500.000
		Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan	28.000.000
		Pembangunan Reformasi Birokrasi	4.000.000
		Penyusunan Review Proses Bisnis dan SOP	80.000.000
		Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat	6.000.000
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	5.000.000
		Penyusunan Standar Pelayanan	80.000.000
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.023.157.150
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		113.160.775
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bag. Adm. Pembangunan)	1.925.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Hukum)	7.200.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	3.225.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Organisasi)	2.000.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.500.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Perekonomian dan SDA)	1.094.775
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	2.316.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Tata Pemerintahan)	900.000
		Pembelian alat listrik, elektronik dan penerangan kantor (Bagian Umum)	90.000.000
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		173.495.243
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bag. Adm. Pembangunan)	10.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Hukum)	32.500.000
		Penyediaan Peralatan dan	12.325.000

		Perlengkapan Kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Organisasi)	7.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	13.500.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Perekonomian dan SDA)	18.998.243
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	16.572.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Tata Pemerintahan)	12.100.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Umum)	50.000.000
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		286.985.500
		Cetak dan Penggandaan (Bagian Tata Pemerintahan)	17.000.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bag. Adm. Pembangunan)	4.000.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	5.715.000
		Pengadaan Barang Cetak Kebutuhan Kantor (Bagian Hukum)	11.000.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Organisasi)	10.000.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	13.000.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Perekonomian dan SDA)	8.893.500
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	26.377.000
		Pengadaan barang cetak kebutuhan kantor (Bagian Umum)	90.000.000
		Penyediaan Bendera (Bagian Umum)	3.000.000
		Penyediaan Biaya Penggandaan (Bagian Hukum)	4.000.000
		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	3.500.000

		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Organisasi)	7.500.000
		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	1.000.000
		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Perekonomian dan SDA)	2.000.000
		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	20.000.000
		Penyediaan biaya penggandaan (Bagian Umum)	40.000.000
		Penyediaan Umbul-umbul Penjor (Bagian Umum)	10.000.000
		Penyediaan Umbul-umbul tlisir (Bagian Umum)	10.000.000
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		12.000.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Bagian Hukum)	12.000.000
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.437.515.632
		Makanan dan Minuman Rapat (Bag. Tata Pemerintahan)	13.500.000
		Pembelian Gula, Teh, Kopi dan air mineral (Bagian Umum)	50.000.000
		Penyediaan biaya perjalanan dinas (Bagian Organisasi)	95.000.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bagian Hukum)	80.000.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	177.500.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	150.000.000
		Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)	45.083.632
		Penyediaan dana perjalanan dinas dan konsultasi ke pemerintah pusat/daerah lain dalam negeri (Bag. Adm. Pembangunan)	70.000.000
		Penyediaan dana perjalanan dinas dan konsultasi ke pemerintah pusat/daerah lain dalam negeri (Bagian Umum)	310.000.000
		Penyediaan kebutuhan makan minum (Bag. Adm. Pembangunan)	25.000.000
		Penyediaan kebutuhan makan minum (Bagian Umum)	100.000.000
		Penyediaan makan minum rapat/tamu (Bagian Organisasi)	10.000.000

		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Bagian Hukum)	42.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	39.750.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	57.000.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Bagian Perekonomian dan SDA)	18.282.000
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	54.400.000
		Perjalanan Dinas (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	100.000.000
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.042.935.820
25	Pengadaan Mebel		244.173.120
		Pengadaan Mebel	200.000.000
		Pengadaan Mebel (Bagian Hukum)	18.500.000
		Pengadaan Mebel (Bagian Perekonomian dan SDA)	25.673.120
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		598.762.700
		Pengadaan Peralatan dan Mesin (Bag. Adm. Pembangunan)	50.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin (Bagian Umum)	200.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bagian Hukum)	65.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bagian Organisasi)	100.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	50.000.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bagian Perekonomian dan SDA)	46.262.700
		Pengadaan Peralatan Kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	87.500.000
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor (Bagian Umum)	200.000.000
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.658.933.360

30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		72.085.500
		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (Bag. Adm. Pembangunan)	1.000.000
		Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya (Bagian Umum)	20.000.000
		Biaya Pengiriman Surat (Bag. Tata Pemerintahan)	2.000.000
		Pengadaan Benda Pos (Bag. Tata Pemerintahan)	6.000.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos dan Jasa Pengiriman Paket/Pos (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	3.000.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos, dan Jasa Pengiriman / Paket Pos (Bagian Perekonomian dan SDA)	2.645.500
		Penyediaan materai, benda pos, dan jasa pengiriman/jasa paket (Bagian Organisasi)	3.000.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos, dan Jasa Pengiriman/Jasa Paket (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	3.500.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos, dan Jasa Pengiriman/Jasa Paket (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	27.340.000
		Penyediaan Materai, Benda Pos, dan Jasa Pengiriman/Jasa Paket Pos (Bagian Hukum)	3.600.000
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4.208.879.000
		Belanja Langganan Surat Kabar/ Majalah (Bag. Tata Pemerintahan)	1.600.000
		Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	2.000.000
		Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	23.529.000
		Langganan Meeting Online (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	6.000.000
		Pembayaran PBB (Bagian Umum)	60.000.000
		Penyediaan Biaya Langganan Alat Komunikasi (Bagian Hukum)	6.400.000
		Penyediaan Biaya Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah (Bagian Hukum)	2.600.000
		Penyediaan biaya langganan surat kabar dan majalah (Bagian Organisasi)	3.500.000
		Penyediaan langganan listrik (Bagian Umum)	3.740.000.000

		Penyediaan langganan PDAM (Bagian Umum)	100.000.000
		Penyediaan langganan telepon (Bagian Umum)	200.000.000
		Penyediaan Lisensi Aplikasi Untuk Penyelenggaraan Rapat Secara Online/ Video Conference Berbayar (Bag. Tata Pemerintahan)	3.600.000
		Penyediaan Surat Kabar / Majalah (Bagian Perekonomian dan SDA)	1.650.000
		Penyediaan surat kabar/ majalah/ jurnal (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	6.000.000
		Penyediaan surat kabar/majalah (Bag. Adm. Pembangunan)	2.000.000
		Penyediaan surat kabar/majalah (Bagian Umum)	50.000.000
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		201.556.220
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Bag. Adm. Pembangunan)	10.200.000
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Bagian Umum)	40.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan Kerja dan Aplikasi - Servis Printer Maintenance Software Servis Laptop/Komputer/Scanner (Bagian Hukum)	25.000.000
		Penyediaan jasa peralatan kerja dan aplikasi (Bagian Organisasi)	5.000.000
		Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	21.000.000
		Penyediaan Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	75.000.000
		Perbaikan ringan atau servis laptop, komputer, printer (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	8.750.000
		Service dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Kerja (Bagian Perekonomian dan SDA)	12.606.220
		Service Mesin Fotocopy, PC, Laptop, Printer (Bag. Tata Pemerintahan)	4.000.000
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		6.176.412.640
		Belanja Bahan Kebersihan (Bag. Tata Pemerintahan)	3.100.000
		Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi (Bagian Umum)	30.000.000
		Honorarium Uang Lembur diluar	30.000.000

		jam kerja (Bagian Umum)	
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Administrasi Pembangunan)	170.000.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Hukum)	184.500.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	150.000.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Perekonomian dan SDA)	172.315.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	1.001.512.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Umum)	3.270.000.000
		Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk TKPK (Bagian Tata Pemerintahan)	170.000.000
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Bag. Tata Pemerintahan)	-
		Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	6.775.000
		Pengisian Ulang Pengharum Ruangan (Bagian Umum)	50.000.000
		Penyediaan Bahan Bakar Gas (Bagian Umum)	10.000.000
		Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan (Bag. Adm. Pembangunan)	5.500.000
		Penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan (Bagian Umum)	150.000.000
		Penyediaan bahan pembersih dan alat-alat kebersihan (Bagian Organisasi)	9.000.000
		Penyediaan Jasa Laundry (Bagian Umum)	15.000.000
		Penyediaan jasa tenaga kontrak (Bagian Organisasi)	256.203.280
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan kantor (Bagian Umum)	30.000.000
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bagian Hukum)	10.000.000
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	6.000.000
		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bagian Perekonomian dan SDA)	4.028.860

		Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	11.903.000
		Penyediaan Tenaga Kontrak (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	325.575.500
		Retribusi Sampah (Bagian Umum)	15.000.000
		Sewa Peralatan dan perlengkapan pendukung kegiatan (Bagian Umum)	30.000.000
		Sewa Tanaman (Bagian Umum)	60.000.000
34	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		9.576.631.200
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.498.520.000
		Belanja Pajak Kendaraan	85.000.000
		Klaim Asuransi	12.000.000
		Penyediaan Bahan Bakar Minyak	1.000.000.000
		Penyediaan Jasa KIR	4.000.000
		Penyediaan Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang Mobil Pimpinan	198.760.000
		Penyediaan Jasa Service dan Penggantian Suku Cadang motor dan mobil pool setda	198.760.000
36	Pemeliharaan Mebel		132.700.000
		Pemeliharaan Mebel (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.000.000
		Pemeliharaan Mebel (Bagian Perekonomian dan SDA)	2.200.000
		Pemeliharaan Mebel (Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan)	25.000.000
		Pemeliharaan mebeler (Bag. Adm. Pembangunan)	25.000.000
		Pemeliharaan mebeler (Bagian Umum)	75.000.000
		Pemeliharaan mebeler kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	1.500.000
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		6.994.000.000
		Pemeliharaan Gedung Tawang Praja	3.000.000.000
		Pemeliharaan Taman	100.000.000
		Pengadaan Lift Gedung Setda Selatan	2.200.000.000
		Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Gedung Kantor	120.000.000
		Penyediaan Bahan Baku Bangunan Pemeliharaan Rumah Jabatan	78.000.000

		Penyediaan Bibit Tanaman	100.000.000
		Penyediaan Ongkos Tukang untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	95.000.000
		Penyediaan Ongkos Tukang Untuk Pemeliharaan Rumah Jabatan	51.000.000
		Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Walikota	800.000.000
		Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Dinas Walikota	200.000.000
		DED Menara Balaikota (Gedung 10 Lantai)	250.000.000
38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		936.411.200
		Pemeliharaan AC (Bagian Organisasi)	7.500.000
		Pemeliharaan Lift di Gedung Tawang Praja 2 unit, Gedung DKK 1 unit dan di Gedung Dispendukcapil 1 unit (Bagian Umum)	140.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	6.000.000
		Pemeliharaan peralatan dan sarana prasarana pendukung gedung kantor (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	3.250.000
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (Bagian Perekonomian dan SDA)	3.511.200
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Bag. Tata Pemerintahan)	2.000.000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi dan Penataan Ruang Kerja (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	200.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Bagian Organisasi)	30.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bag. Adm. Pembangunan)	100.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Bagian Hukum)	6.000.000
		Perbaikan Hidran Komplek Balaikota (Bagian Umum)	40.000.000
		Perbaikan Hidran Rumah Dinas (Bagian Umum)	25.000.000
		Perbaikan Service AC split, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon (Bag. Adm. Pembangunan)	3.150.000

		Perbaikan Service AC split, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon (Bagian Umum)	90.000.000
		Perbaikan Service AC, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon pada gedung Bale Upakari (Bagian Umum)	50.000.000
		Perbaikan Service AC, Penggantian Suku Cadang dan Pengisian Freon pada Gedung DKK (Bagian Umum)	80.000.000
		Service dan Penggantian Suku Cadang Peralatan Mesin, Hidran, Lift, Genset, Sound System dan Peralatan Lainnya (Bagian Umum)	150.000.000
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.000.000
		Pemeliharaan Peralatan Komunikasi Radio Pemancar VHF	15.000.000
40	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.100.000.000
41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		900.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	900.000.000
42	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100.000.000
		Penyediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	100.000.000
43	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100.000.000
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000
44	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		8.880.993.000
45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		675.000.000
		Alat Kebersihan KDH	25.000.000
		Belanja Doorprize Kegiatan KDH	150.000.000
		Jasa Laundry	90.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	75.000.000
		Penyediaan Makan dan Minum Harian KDH	260.000.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi dan Informatika KDH dan WKDH	75.000.000
46	Penyediaan Kebutuhan Rumah		535.000.000

	Tangga Wakil Kepala Daerah		
		Alat Kebersihan WKDH	25.000.000
		Belanja Doorprize Kegiatan WKDH	150.000.000
		Jasa Laundry	90.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	75.000.000
		Penyediaan Makan dan Minum Harian WKDH	195.000.000
47	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		7.670.993.000
		Alat Kebersihan	90.993.000
		Belanja Doorprize Kegiatan Sekretariat Daerah	75.000.000
		Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Administrasi Pimpinan	200.000.000
		Open House Hari Raya Keagamaan	400.000.000
		Open House Idul Fitri KDH dan WKDH	525.000.000
		Pengadaan Command Center Pimpinan	2.500.000.000
		Pengadaan Mebelair	1.000.000.000
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.200.000.000
		Penyediaan Makan Minum Sekretariat Daerah	1.500.000.000
		Transport PNS/Non PNS Petugas Dalam Rangka Kegiatan Di Luar Hari/Jam Kerja Dinas	180.000.000
48	Penataan Organisasi		2.435.000.000
49	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		560.000.000
		Evaluasi Kelembagaan	150.000.000
		Penyusunan dokumen Review Anjab, ABK, dan evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemkot Surakarta	250.000.000
		Penyusunan Perda/Perwali tentang pembentukan Perangkat Daerah	100.000.000
		Penyusunan Perkada Tambahan Penghasilan ASN	60.000.000
50	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		375.000.000
		Pendampingan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	125.000.000
		Pendampingan Penyusunan Probis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	150.000.000
		Penyusunan Perwali penyelenggaraan pelayanan publik	100.000.000
51	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		325.000.000
		Fasilitasi dan Monev Road Map RB di Lingkungan Pemerintah	225.000.000

		Kota Surakarta	
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja	100.000.000
52	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan T ata Laksana		625.000.000
		Manajemen Perubahan SPBE	125.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	100.000.000
		Monitoring dan Evaluasi SKM dan FKP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	125.000.000
		Monitoring dan Evaluasi SP dan SOP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	125.000.000
		Pengembangan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	150.000.000
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		550.000.000
		Penyusunan Cascading dan IKU/IKI di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	300.000.000
		Penyusunan SAKIP Kota Surakarta	250.000.000
54	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		6.967.510.000
55	Fasilitasi Keprotokolan		1.554.011.000
		Belanja Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	75.451.000
		Fasilitasi Kunjungan Lapangan Walikota dan Wakil Walikota	268.010.000
		Layanan Keprotokolan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota / Advance Tim Protokol	325.000.000
		Penerimaan Tamu	601.310.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	134.240.000
		Pengembangan Inovasi Lokananta	150.000.000
56	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		2.360.576.000
		Belanja Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	325.456.000
		Dialog TV	119.180.000
		Fasilitasi Kegiatan Komunikasi Kemasyarakatan	451.068.000
		Iklan Layan Masyarakat	75.000.000
		Komunikasi Pimpinan melalui Radio	62.250.000
		Konferensi Pers	140.595.000
		Lomba Pembuatan Logo Hari Jadi Kota Solo	84.517.000
		Media Gathering	361.750.000
		Pembuatan Analisa Berita dan Pembentukan Opini Publik	180.680.000

		Pembuatan Dokumentasi Video	59.800.000
		Publikasi Kebijakan Pimpinan Lewat Media Cetak dan Elektronik	100.000.000
		Refleksi Tahunan Pimpinan Daerah	198.170.000
		Siaran Langsung Online	60.680.000
		Siaran Langsung Radio	35.750.000
		Siaran TV	105.680.000
57	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		3.052.923.000
		Belanja Biaya Telephone seluler	100.000.000
		Belanja Karangan Bunga	310.000.000
		Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000.000
		Cetak Foto Dokumentasi	51.482.000
		Liputan Kegiatan Pimpinan	287.500.000
		Pengadaan Piala	98.378.000
		Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor TU Pimpinan	505.563.000
		Perjalanan Dinas Luar Negeri	500.000.000
58	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		12.296.320.200
59	Administrasi Tata Pemerintahan		1.683.550.000
60	Penataan Administrasi Pemerintahan		-
61	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1.231.550.000
		Fasilitasi Konsultasi SKPD urusan Kewilayahan	89.800.000
		Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan TMMD dan KBD	53.000.000
		Fasilitasi Pembinaan Kecamatan	60.000.000
		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kewilayahan	9.250.000
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DPK	45.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Lomba Kelurahan)	360.000.000
		Penamaan Unsur Rupabumi	200.000.000
		Penegasan Batas Wilayah	82.000.000
		Penyediaan Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	137.500.000
		Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong	80.000.000
		Sosialisasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK)	115.000.000
62	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		452.000.000
		Fasilitasi Konsultasi SKPD Otonomi Daerah	90.000.000
		Pemeliharaan Aplikasi LKPJ	30.000.000
		Penyusunan Dokumen dan Penayangan RLPPD	170.000.000

		Penyusunan Dokumen Laporan Penerapan SPM	12.000.000
		Penyusunan Dokumen LKPJ Walikota	110.000.000
		Penyusunan Dokumen LPPD	40.000.000
63	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		7.140.770.200
64	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		4.739.225.200
		Fasilitasi Buka Bersama Rutan	41.250.000
		Fasilitasi Ibadah Umroh	875.000.000
		Fasilitasi Idul Adha	205.391.000
		Fasilitasi LPTQ, MTQ Kota	82.575.000
		Fasilitasi Natal Pemkot	125.680.000
		Fasilitasi Natal Rutan	42.500.000
		Fasilitasi Pengajian Rutin Pemkot	144.550.000
		Fasilitasi Pertemuan Tokoh Agama/ Aliran Kepercayaan dengan Pemerintah	33.250.000
		Fasilitasi Seleksi Peserta Ibadah Umroh	12.550.000
		Fasilitasi Sholat Hari Raya	12.500.000
		Halal Bi halal ASN	100.680.000
		Hibah Pondok Pesantren	1.500.000.000
		Kebaktian Katolik	17.569.200
		Kebaktian Kristen	17.569.200
		Monev Hibah Pondok Pesantren	3.000.000
		Monitoring dan Evaluasi Kerukunan Umat Beragama	6.750.000
		Operasional Masjid Balaikota	52.500.000
		Pelatihan Guru TPQ	32.500.000
		Pelayanan Jemaah Haji dan Pembayaran PHD	982.660.000
		Pengajian Akbar, Dzikir dan Sholawat	125.680.000
		Pengajian Maulid Nabi	35.525.000
		Pesparani	33.262.500
		Pesparawi	33.262.500
		Retret Kristen dan Katolik	82.155.000
		Safari Sholat Jumat	17.500.000
		Sema'an dan Istighotsah	53.215.800
		Sema'an Khotaman Al Quran	35.150.000
		Updating Data Tempat Peribadatan	12.500.000
		Wisuda Santri	22.500.000
65	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		2.286.890.000
		Evaluasi Pelaksanaan dan Monitoring Pemberdayaan Posyandu (Lomba Posyandu)	155.500.000
		Fasilitasi dan Koordinasi bidang Kesehatan terkait TB dan HIV	23.025.000

		AIDS	
		Fasilitasi dan Koordinasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	52.650.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU)	18.875.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok Masyarakat dan Individu	1.750.000.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan LKK	72.560.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pokjantal Posyandu	23.025.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Tim Pembina UKS/M	23.025.000
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK (Penguatan Jejaring PKK)	50.680.000
		Monev Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok Masyarakat dan Individu	15.000.000
		Pendayagunaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LKK	102.550.000
66	Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		114.655.000
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	59.730.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	32.650.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Aplikasi SIPKEMAS	16.025.000
		Rakor Forum Kesra	6.250.000
67	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		2.536.000.000
68	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		393.000.000
		Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000
		Forum Group Discussion Peraturan Perundang-Undangan	33.000.000
		Penyusunan Produk Hukum Daerah / Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Forum Group Discussion)	306.000.000
69	Fasilitasi Bantuan Hukum		1.284.000.000
		Bantuan Hukum Warga Miskin	100.000.000
		Beracara / Penanganan Permasalahan Hukum	350.000.000
		Forum Group Discussion / Rapat Koordinasi	142.000.000

		Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	520.000.000
		Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum	142.000.000
		Workshop Bantuan Hukum / Sosialisasi Anggota Korpri	30.000.000
70	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		859.000.000
		Evaluasi Penyelenggaraan SINTAKUMAERAH	47.000.000
		Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	293.000.000
		Penyelenggaraan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)	47.000.000
		Penyusunan Buletin Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	193.000.000
		Penyusunan Kajian Peraturan Daerah	97.000.000
		Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Daerah	70.000.000
		Sosialisasi Peraturan Daerah	112.000.000
71	Fasilitasi Kerjasama Daerah		936.000.000
72	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		461.000.000
		Desk Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama dalam Negeri	13.000.000
		Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Antar Daerah SUBOSUKAWONOSRATEN	50.000.000
		Fasilitasi Penyediaan Bahan Penyusunan Naskah Kerjasama	12.000.000
		Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam Keanggotaan FORSESDASI, APEKSI Komwil III, dan APEKSI	76.000.000
		Konsultasi dan Rapat Koordinasi Luar Daerah dalam Rangka Fasilitasi Kerjasama Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	90.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Pleno TKKSD	45.000.000
		Penyelenggaraan Workshop Pemetaan Potensi Rencana Kerja Sama dalam Negeri	55.000.000
		Rapat Koordinasi Penyusunan Naskah Dalam Negeri	120.000.000
73	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		351.000.000
		Fasilitasi Rapat Koordinasi Hubungan Luar Negeri	18.500.000
		Jamuan Penerimaan Tamu di Restoran	12.500.000
		Keikutsertaan Pemerintah Kota Surakarta dalam UCLG ASPAC dan OWHC-AP	103.000.000
		Penerimaan Kunjungan Tamu	32.000.000

		Asing ke Kota Surakarta	
		Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000
		Perjalanan Dinas Pengurusan Hubungan Internasional	25.000.000
		Workshop Tematik Kolaborasi dengan Organisasi Internasional	60.000.000
74	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		124.000.000
		Desk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	40.000.000
		Dokumen Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	4.000.000
		Dokumen Sosialisasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	80.000.000
75	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		2.231.988.540
76	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		372.677.910
77	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		168.251.050
		Fasilitasi dan Koordinasi Evaluasi Kinerja BUMD dan BLUD	5.830.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BLUD	4.895.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD	100.381.050
		Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan RKAP BUMD	1.650.000
		Penyusunan Kajian Kelayakan Investasi BUMD	55.495.000
78	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		64.752.600
		Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Perekonomian Soloraya	26.466.000
		Fasilitasi dan Monitoring TPID	38.286.600
79	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		139.674.260
		Fasilitasi dan Koordinasi CSR/TJSP	16.621.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan UMKM	74.617.400
		Koordinasi dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	19.144.950
		Koordinasi dan Fasilitasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	19.366.710
		Penyediaan Jasa Tenaga Bongkar Muat	5.500.000
		Penyediaan Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.424.200
80	Administrasi Pembangunan		570.000.000
81	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		-

82	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		275.000.000
		Laporan Hasil Pengelolaan Manajemen Risiko	75.000.000
		Monitoring dan Pengendalian Capaian Realisasi Program Pembangunan Seluruh SKPD di Pemerintah Kota Surakarta	75.000.000
		Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	125.000.000
83	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		295.000.000
		Dokumen Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD	75.000.000
		Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	75.000.000
		Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Bankeu Provinsi	20.000.000
		Penyusunan RTP dan Evaluasi Manajemen Risiko	125.000.000
84	Pengadaan Barang dan Jasa		931.400.000
85	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		382.800.000
		Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa - 1	75.000.000
		Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa - 2	75.000.000
		Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	87.800.000
		Lelang/Tender Pengadaan Barang dan Jasa Paket Konstruksi, Barang Jasa Lainnya, Konsultansi	110.000.000
		Pengelolaan Katalog Lokal	15.000.000
		Review PDN Barang dan Jasa	20.000.000
86	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		142.000.000
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Infoprocurement	90.000.000
		Surveillance 17 Standar LPSE	52.000.000
87	Pembinaan dan Advokasi Pengadaaan Barang dan Jasa		406.600.000
		Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa	21.600.000
		Kegiatan Operasional Clearing House Pengadaan Barang dan Jasa	54.000.000
		Pelatihan SIRUP - SPSE	25.000.000
		Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - 1	52.750.000
		Peningkatan Kapasitas Layanan	52.750.000

		Pengadaan Barang dan Jasa - 2	
		Rakor Moneyv Pengadaan Barang dan Jasa	95.500.000
		Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa	105.000.000
88	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam		357.910.630
89	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		328.123.180
		Sekretariat DBHCHT	278.354.890
		Sosialisasi DBHCHT	49.768.290
90	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		29.787.450
		Fasilitasi dan Koordinasi Hemat Energi Listrik dan Air	2.915.000
		Fasilitasi dan Rapat Koordinasi Stok LPG 3 kg	26.872.450
	TOTAL		82.103.969.270

Surakarta, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SURAKARTA



[Handwritten Signature]
BUDI MURTONO, SE. M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197110101998031010